

Artikel

From: Erna Setijaningrum (erna_set@yahoo.com)

To: mkpsurabaya@gmail.com

Date: Tuesday, 6 January 2015, 09:07 pm GMT+7

Kepada : redaksi jurnal mkp

Berikut, saya kirimkan artikel ilmiah untuk bisa dimuat di jurnal MKP. Artikel ini adalah hasil dari penelitian dengan judul "Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan" yang dibiayai oleh DIPA BOPTN sesuai SK Rektor Unair tentang kegiatan penelitian Unggulan PT, no : 965/UN3/2014, tanggal 28 Februari 2014.

Besar harapan saya agar artikel tersebut bisa dimuat di jurnal MKP, dan apabila ada teknis penulisan yang masih kurang sesuai, akan sy perbaiki

Salam

Erna Setijaningrum
Departemen Administrasi
FISIP - Unair



Desain thn 2.doc
158kB

Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

(Erna Setijaningrum)

Abstract

This research aims to make the design of an integrated program to combat poverty in the city of Surabaya in accordance with the needs of the poor. There are 8 pieces of priority needs of the poor, namely (1) education, (2) Health, (3) housing, (4) the nine basic, (5) Water, (6) Ease of administration, (7) Training expertise, (8) employment. While the agencies that implement integrated programs to reduce poverty there are a number of 9 institutions, namely (1) Department of Education, (2) Social Service, (3) Department of Labor, (4) Bapemas KB, (5) Department of Human Settlements, (6) taps, (7) Department of Civil and Population, (8) Sub-District and Sub-District, (9) Department of Industry and Trade.

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kota besar / metropolis tentunya Surabaya banyak melakukan pembangunan di segala bidang. Meskipun demikian, angka kemiskinan di kota Surabaya masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Surabaya 2011, jumlah keluarga miskin (Gakin) tercatat sebanyak 112.465 kepala keluarga (KK) atau sekitar 449.860 jiwa (dengan asumsi bahwa 1 KK terdiri dari empat jiwa)

Kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Semampir, kecamatan Tambaksari, dan kecamatan Simokerto. Kecamatan Semampir terdiri dari 5 kelurahan dengan 60.41% keluarga miskin, Tambaksari terdiri dari 6 kelurahan dengan 12.47% keluarga miskin, sedangkan kecamatan Simokerto terdiri dari 5 kelurahan dengan 41.82% keluarga miskin. Berikut, data prosentase keluarga miskin di Kecamatan Semampir, Tambaksari, dan Simokerto.

Tabel 1 :
 Prosentase Keluarga Miskin
 di Kecamatan Semampir, Tambaksari, Simokerto
 Tahun 2011

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Keluarga Seluruhnya	Jumlah Keluarga Miskin	Prosentase (%)
1	Semampir	Ampel	5.333	906	6,33
		Sidotopo	8.271	4.937	13,21
		Pegirian	6.610	3.561	10,17
		Wonokusumo	12.244	5.887	18,13
		Ujung	7.485	5.176	12,60
Jumlah			39.943	20.467	60,41
2	Tambaksari	Pacarkeling	7.559	1.537	20.33
		Pacar Kembang	9.469	1.701	17.96
		Ploso	6.376	2.016	31.62
		Tambaksari	3.940	1.142	28.98
		Rangkah	3.863	1.080	27.96
		Gading	24.357	3.037	12.47
		Jumlah			55.564
3	Simokerto	Kapasan	16.980	692	4.07
		Tambak Rejo	17.668	1.552	8.78
		Simokerto	23.822	1.752	7.35
		Sidodadi	16.080	1.682	10.46
		Simolawang	22.108	2.468	11.16
Jumlah			96.658	8.146	41.82

Sumber : BPS Jatim 2012

Angka kemiskinan yang cukup tinggi tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti pengangguran, masalah sosial, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan lingkungan yang kumuh dan permasalahan yang lain.

Sebenarnya berbagai program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Namun, upaya tersebut terlihat masih belum efektif lebih dikarenakan berbagai program kemiskinan yang dikerjakan oleh banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki program sendiri - sendiri. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan tersebut tidak tefokus dan berlangsung tanpa arah yang jelas. Banyak sekali program yang dilaksanakan berbagai SKPD tersebut saling tumpang tindih / *overlapping*, dan tidak saling menunjang. Setidaknya ada dua penyebab tidak efektifnya program penanggulangan

kemiskinan, yaitu pertama, tidak ada koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan; kedua, program hanya berdasar pada project tanpa memperhatikan pada kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, telah dilakukan penelitian yang dilakukan pada 9 kelurahan yang berada di 3 kecamatan. Pemilihan lokasi kelurahan ini berdasar tingginya angka kemiskinan di 3 Kecamatan tersebut, dengan mengambil masing-masing 3 Kelurahan sebagai sample. Kesembilan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Semampir ; Kelurahan Sidotopo, Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Ujung
2. Kecamatan Tambaksari : Kelurahan Ploso, Kelurahan Tambaksari, Kelurahan Rangkah
3. Kecamatan Simokerto : Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Simolawang

Selama ini, untuk menanggulangi masalah kemiskinan terdapat delapan instansi yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan yaitu : (1) Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), (2) Bapemas dan KB, (3) Dinas Koperasi dan UMKM, (4) Disperindag, (5) Dinas Kesehatan, (6) Dinas Tenaga Kerja, (7) Dinas Sosial, (8) Dispendik. Program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait selama ini, semuanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin secara umum. Dengan demikian tidak ada program khusus yang memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di sejumlah sembilan kelurahan lokasi penelitian (Kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambakrejo, Sidodadi, dan Simolawang) yang secara statistik memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Semua instansi dalam menjalankan programnya selalu memiliki keterkaitan dengan instansi lain. Namun keterkaitan ini tidak selalu diikuti dengan adanya koordinasi antara instansi tersebut. Bahkan ada beberapa program yang *overlapping* satu dengan yang lain.

Oleh karena itulah, diperlukan adanya program terpadu untuk pengentasan kemiskinan di kota Surabaya. Program terpadu yang harus disediakan merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan memerlukan keterkaitan dan koordinasi antar instansi, tanpa ada *overlapping* antar pelaksana program. Untuk merealisasikan program terpadu dalam

penanggulangan kemiskinan, diperlukan kesiapan matang dari pelaksana program / instansi terkait.

Program terpadu yang harus disediakan tersebut adalah suatu program yang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin. Dengan demikian, rumusan masalah dalam kajian ini adalah “Program terpadu pengentasan kemiskinan apa sajakah yang paling sesuai bagi kelompok miskin di perkotaan berdasar prioritas kebutuhan mereka ?”

B. Desain Program Terpadu

Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata "desain" bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, "desain" memiliki arti "proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru". Sebagai kata benda, "desain" digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk obyek nyata.

Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik dan berbagai macam aspek lainnya, yang biasanya datanya didapatkan dari riset, pemikiran, *brainstorming*, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya

Berikut ini adalah pengertian dan definisi desain:

1. Choirul Amin : Desain adalah kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, corak
2. Ken Hurts ; Desain adalah proses iteratif yang melibatkan banyak aktivitas tinjauan ke belakang dan pararel
3. Dedi Nurhadiat ; Desain adalah perencanaan untuk mewujudkan suatu gagasan,
4. Widagdo ; Desain berkaitan dengan nilai-nilai kontekstual yang menyuarakan kebudayaan .
5. Dudy Wiyancoko ; Desain adalah segala hal yang berhubungan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing/rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan test riding.
6. Andya Primanda ; Desain adalah upaya untuk menemukan titik tengah dari segala macam masukan yang seringkali berseberangan.
7. Soekarno & lanawati Basuki ; Desain adalah pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, seperti busana.

8. Janner Simarmata ; Desain adalah bagaimana aplikasi yang dirancang menjadi sesuai dengan kebutuhan

Dari berbagai pendapat tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Desain merupakan langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda, seperti baju, furniture, bangunan, dan lain-lain. Pada saat pembuatan desain biasanya mulai memasukkan unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, cita rasa, dan lain-lain. Sehingga bisa dibilang bahwa sebuah desain merupakan bentuk perumusan dari berbagai unsur termasuk berbagai macam pertimbangan di dalamnya

Untuk mendefinisikan tentang Program, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bukunya, *Administration of Development Programs and Project, Some Major Issues*, mengemukakan rumusan konseptual mengenai program:

“Program adalah aktivitas social yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas “ (Tjokroamijoyo, 1990).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa program merupakan bentuk operasional dari kebijakan dimana suatu program tersusun secara jelas dan jika masih bersifat umum, maka program harus diterjemahkan secara lebih operasional menjadi proyek. Kejelasan ini diperlukan karena hanya dengan itulah diperoleh kriteria untuk memeriksa dan mengvaluasi tindakan administrasi yang dilakukan oleh birokrasi guna mentransformasikan kebijakan menjadi kegiatan nyata. (Wibowo, 1994).

Suatu program yang baik harus mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai berikut:

- Tujuan yang dirumuskan harus jelas
- penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
- suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin
- pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut
- hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya: suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri

- berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. (Tjokroamidjoyo, 1990)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa program merupakan bentuk operasional dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah yang tersusun secara jelas.

Untuk mendapatkan desan program terpadu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya koordinasi antar pelaksana. Banyak ahli mendefinisikan pemahaman tentang koordinasi dengan memberi pendapat yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni bahwa koordinasi adalah asas umum dalam semua organisasi atau dapat dikatakan koordinasi adalah asas pokok organisasi.

Mooney dalam Sutarto (1998) mengemukakan bahwa pengertian koordinasi adalah *“The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of common purpose.”* Dengan demikian Mooney memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Pengaturan usaha kelompok atau organisasi memang diperlukan, mengingat organisasi terdiri atas sejumlah unit kerja yang berlainan fungsi namun diikat oleh satu kesatuan tujuan tertentu.

Selaras dengan pendapat di atas Benn dalam Sutarto (1998) mengatakan bahwa *“Coordination: A Continuous, harmonious action toward the objectives, attained through leadership, organization, and administration; The arrangement of group efforts in a continuous and orderly manner so as to provide unification of action in the pursuit of a common goal.”*

Dari pendapat di atas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa koordinasi suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan, yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi; dan koordinasi juga dipandang sebagai suatu penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

C. Instansi Terkait Berdasar Prioritas Kebutuhan Kelompok Miskin

Secara umum, terdapat sejumlah delapan prioritas kebutuhan bagi kelompok miskin yaitu : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan, (4) sembilan bahan pokok, (5) Air bersih, (6) Kemudahan administrasi, (7) Pelatihan keahlian, (8) Lapangan pekerjaan.

Sedangkan instansi yang terlibat dalam penanganannya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Instansi yang Terlibat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

No	Prioritas Kebutuhan	Instansi Terkait
1	Pendidikan	a. Dinas Pendidikan b. Dinas Sosial c. Dinas Tenaga Kerja
2	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial 3. Bapemas KB
3	Perumahan	1. Dinas Cipta Karya 2. Dinas Sosial 3. Dinas Kesehatan
4	Sembilan bahan pokok	1. Bapemas dan KB 2. Dinas Sosial 3. Dinas Kesehatan
5	Air bersih	1. Dinas Kesehatan 2. PDAM
6	Kemudahan Administrasi	1. Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan 2. Kelurahan dan Kecamatan
7	Pelatihan Keahlian	1. Dinas Sosial 2. Disperindag 3. Bappemas dan KB
8	Lapangan kerja	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Hasil olah data lapangan

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa instansi yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah : (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Sosial, (3) Dinas Tenaga Kerja, (4) Bapemas KB, (5) Dinas Cipta Karya, (6) PDAM, (7) Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, (8) Kelurahan dan Kecamatan, (9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

D. Program Terpadu Spesifik Bagi Kelompok Miskin

Dari hasil kajian yang telah dilaksanakan, terdapat program spesifik – program yang memang dikhususkan bagi kelompok miskin – di kota Surabaya yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait. Namun terdapat pula usulan program yang menurut berbagai instansi terkait akan bisa menambah efektifnya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Berikut, adalah program-program yang telah teridentifikasi :

Tabel 3
Program Terpadu Spesifik untuk Pengentasan Kemiskinan

No	Prioritas Kebutuhan	Instansi	Program spesifik yang telah dilaksanakan	Usulan program spesifik
1	Pendidikan	Dispendik	Bantuan Siswa Miskin (BSM)	
			Beasiswa sekolah perkapalan	
			Pembinaan SD, SMP dan SMA terbuka	
		Dinsos	Bantuan Pemberian Seragam dan Alat Tulis	Program bantuan perlengkapan sekolah Beasiswa Unggulan Kalijudan
2	Kesehatan	Dinkes	Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Jamkesmas Non Kuota) dan Jampersal	
		Dinsos	Khitan Masal Anak dari Keluarga Tidak Mampu	
		Bapemas dan KB	Penyediaan dan pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin	
3	Perumahan	Dinas Cipta Karya	Bedah Rumah / Rehabilitasi Rumah	
		Dinas Sosial	Fasilitasi dan pendampingan lingkungan rumah	

4	Sembilan Bahan Pokok	Bapemas dan KB	Tim Koordinasi Program Beras Miskin	
		Dinas Sosial	Penyediaan bahan makan sehat bagi balita keluarga miskin (protein telur)	
5	Air Bersih	PDAM	Penyediaan air bersih	
6	Kemudahan Administrasi	Discapilduk	fasilitas pengurusan akte kelahiran	
7	Pelatihan Keahlian	Bapemas dan KB	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Keluarga Miskin	
8	Lapangan kerja	Disnaker	Pendampingan dan pemilihan Bidang Kerja Bagi Calon Lulusan SMA / SMK / MA kelompok miskin	

Sumber : hasil olah data

Dari tabel diatas, secara umum bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Prioritas kebutuhan pendidikan bagi kelompok miskin ; terdapat sejumlah empat (4) program spesifik yang telah dilaksanakan. Sejumlah tiga (3) program dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan satu (1) program dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
2. Prioritas kebutuhan kesehatan bagi kelompok miskin ; terdapat sejumlah tiga (3) program spesifik yang telah dilaksanakan. Masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapemas dan KB. Sedangkan Dinas Sosial mengusulkan 2 buah program lagi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin.
3. Prioritas kebutuhan perumahan bagi kelompok miskin ; terdapat sejumlah dua (2) program spesifik yang telah dilaksanakan. Masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Dinas Sosial. Sedangkan Dinas Sosial mengusulkan 1 buah program lagi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin.

4. Prioritas kebutuhan sembilan bahan pokok bagi kelompok miskin ; terdapat sejumlah dua (2) program spesifik yang telah dilaksanakan. Masing-masing dilaksanakan oleh Bapemas KB dan Dinas Sosial.
5. Prioritas kebutuhan air bersih bagi kelompok miskin ; terdapat sejumlah satu (1) program spesifik yang dilaksanakan oleh PDAM.
6. Prioritas kebutuhan kemudahan administrasi bagi kelompok miskin ; terdapat sejumlah satu (1) program spesifik yang dilaksanakan oleh Discapilduk.
7. Prioritas kebutuhan pelatihan keahlian bagi kelompok miskin ; terdapat sejumlah satu (1) program spesifik yang dilaksanakan oleh Bapemas dan KB
8. Prioritas kebutuhan lapangan kerja bagi kelompok miskin ; terdapat sejumlah satu (1) program spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja

E. Penutup

Tiap-tiap instansi harus lebih fokus pada program-program spesifik penanggulangan kemiskinan, dimana program tersebut harus benar-benar diperuntukkan bagi kelompok miskin. Dengan demikian, setiap tahun akan muncul usulan program spesifik yang pada akhirnya program tersebut akan efektif menanggulangi kemiskinan di perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc
- Bintarto, R, Prof, 1993, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Galia Indonesia.
- Kartasamita, 1996, *Pemberdayaan : Pembangunan Berwajah Manusia*, Raja Grafindo Persada
- Khudori, Darwis, 1995, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta, PPSK
- Lewis, Oscar 2004 "Kebudayaan Kemiskinan", dalam *Kemiskinan di Perkotaan* (di-edit oleh Parsudi Suparlan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan.
- Lipton, Michael ,1977 , *Urbanitation in the Modern World*, London: Faber and Faber.
- Miles, Matthew B dan Michael A. Huberman, 1992., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta-Ui Press.
- Prawirakusuma, Soeharto, 2001, *Ekonomi Rakyat*, University Gadjah Mada Press
- Proserpina, D, 2003, *Empowerment & Development*, University of the Philippines Press
- Sudjatmoko, 2003, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Internet :
- www.wikipedia.com (diakses tgl 15 Desember 2013)
- www.kemiskinankota.com (diakses tgl 15 Desember 2013)
- [http//indos.org.cuhn](http://indos.org.cuhn). (diakses tgl 23 Desember 2013)

Re: Artikel

From: Masyarakat Kebudayaan Politik (mkpsurabaya@gmail.com)

To: erna_set@yahoo.com

Date: Saturday, 21 March 2015, 11:00 am GMT+7

Yth. Ibu Erna Setijaningrum,

Terima kasih, dan saat ini artikel anda sedang dalam proses review.

Hormat kami,
Redaksi Jurnal MKP

2015-01-06 21:07 GMT+07:00 Erna Setijaningrum <erna_set@yahoo.com>:

Kepada : redaksi jurnal mkp

Berikut, saya kirimkan artikel ilmiah untuk bisa dimuat di jurnal MKP. Artikel ini adalah hasil dari penelitian dengan judul "Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan" yang dibiayai oleh DIPA BOPTN sesuai SK Rektor Unair tentang kegiatan penelitian Unggulan PT, no : 965/UN3/2014, tanggal 28 Februari 2014.

Besar harapan saya agar artikel tersebut bisa dimuat di jurnal MKP, dan apabila ada teknis penulisan yang masih kurang sesuai, akan sy perbaiki

Salam
Erna Setijaningrum
Departemen Administrasi
FISIP - Unair

Re: Artikel

From: Masyarakat Kebudayaan Politik (mkpsurabaya@gmail.com)

To: erna_set@yahoo.com

Date: Wednesday, 27 July 2016, 10:56 am GMT+7

Yth Erna Setijaningrum

Kami telah menerima dengan baik artikel anda yang berjudul "Desain Program terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" tertanggal 6 Januari 2015. Kami berencana menerbitkan artikel ini untuk MKP 28-2 yakni edisi April-Juni 2015. Apakah artikel ini telah diterbitkan di jurnal lain dan apakah anda bersedia jika artikel ini diterbitkan untuk edisi April-Juni 2015? Kami tunggu konfirmasinya. Terimakasih.

Salam Redaksi

2015-03-21 11:00 GMT+07:00 Masyarakat Kebudayaan Politik <mkpsurabaya@gmail.com>:

Yth. Ibu Erna Setijaningrum,

Terima kasih, dan saat ini artikel anda sedang dalam proses review.

Hormat kami,
Redaksi Jurnal MKP

2015-01-06 21:07 GMT+07:00 Erna Setijaningrum <erna_set@yahoo.com>:

Kepada : redaksi jurnal mkp

Berikut, saya kirimkan artikel ilmiah untuk bisa dimuat di jurnal MKP. Artikel ini adalah hasil dari penelitian dengan judul "Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan" yang dibiayai oleh DIPA BOPTN sesuai SK Rektor Unair tentang kegiatan penelitian Unggulan PT, no : 965/UN3/2014, tanggal 28 Februari 2014.

Besar harapan saya agar artikel tersebut bisa dimuat di jurnal MKP, dan apabila ada teknis penulisan yang masih kurang sesuai, akan sy perbaiki

Salam
Erna Setijaningrum
Departemen Administrasi
FISIP - Unair

Re: Artikel

From: Erna Setijaningrum (erna_set@yahoo.com)

To: mkpsurabaya@gmail.com

Date: Wednesday, 27 July 2016, 01:29 pm GMT+7

Sebelumnya, terima kasih telah diberikan informasi ini. Dengan senang hati saya menyatakan kesediaan bahwa artikel tersebut diterbitkan untuk edisi April - Juni 2015. Artikel tersebut belum pernah diterbitkan di jurnal lain.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya

Erna

On Tuesday, 26 July 2016, 20:56, Masyarakat Kebudayaan Politik <mkpsurabaya@gmail.com> wrote:

Yth Erna Setijaningrum

Kami telah menerima dengan baik artikel anda yang berjudul "Desain Program terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" tertanggal 6 Januari 2015

Kami berencana menerbitkan artikel ini untuk MKP 28-2 yakni edisi April-Juni 2015 Apakah artikel ini telah diterbitkan di jurnal lain dan apakah anda bersedia jika artikel ini diterbitkan untuk edisi April-Juni 2015? Kami tunggu konfirmasinya. Terimakasih.

Salam Redaksi

2015-03-21 11:00 GMT+07:00 Masyarakat Kebudayaan Politik
<mkpsurabaya@gmail.com>:

Yth. Ibu Erna Setijaningrum,

Terima kasih, dan saat ini artikel anda sedang dalam proses review.

Hormat kami,
Redaksi Jurnal MKP

2015-01-06 21:07 GMT+07:00 Erna Setijaningrum <erna_set@yahoo.com>:

Kepada : redaksi jurnal mkp

Berikut, saya kirimkan artikel ilmiah untuk bisa dimuat di jurnal MKP. Artikel ini adalah hasil dari penelitian dengan judul "Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan" yang dibiayai oleh DIPA BOPTN sesuai SK Rektor Unair tentang kegiatan penelitian Unggulan PT, no : 965/UN3/2014, tanggal 28 Februari 2014.

Besar harapan saya agar artikel tersebut bisa dimuat di jurnal MKP, dan apabila ada teknis penulisan yang masih kurang sesuai, akan sy perbaiki

Salam
Erna Setijaningrum
Departemen Administrasi
FISIP - Unair



Re: Artikel

From: Masyarakat Kebudayaan Politik (mkpsurabaya@gmail.com)

To: erna_set@yahoo.com

Date: Tuesday, 9 August 2016, 11:09 am GMT+7

YTH Ibu Erna.

Artikel anda sudah kami revisi, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu tidak ada korespondensi dan kata kunci, metode penelitian tidak ada dan dalam daftar pustaka mohon dilakukan kroscek lagi antara sitasi yang ada di badan artikel dan yang ada di daftar pustaka.

Terima kasih. Salam Redaksi

2016-07-27 13:29 GMT+07:00 Erna Setijaningrum <erna_set@yahoo.com>:

Sebelumnya, terima kasih telah diberikan informasi ini. Dengan senang hati saya menyatakan kesediaan bahwa artikel tersebut diterbitkan untuk edisi April - Juni 2015. Artikel tersebut belum pernah diterbitkan di jurnal lain.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya

Erna

On Tuesday, 26 July 2016, 20:56, Masyarakat Kebudayaan Politik <mkpsurabaya@gmail.com> wrote:

Yth Erna Setijaningrum

Kami telah menerima dengan baik artikel anda yang berjudul "Desain Program terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" tertanggal 6 Januari 2015

Kami berencana menerbitkan artikel ini untuk MKP 28-2 yakni edisi April-Juni 2015 Apakah artikel ini telah diterbitkan di jurnal lain dan apakah anda bersedia jika artikel ini diterbitkan untuk edisi April-Juni 2015? Kami tunggu konfirmasinya. Terimakasih.

Salam Redaksi

2015-03-21 11:00 GMT+07:00 Masyarakat Kebudayaan Politik <mkpsurabaya@gmail.com>:

Yth. Ibu Erna Setijaningrum,

Terima kasih, dan saat ini artikel anda sedang dalam proses review.

Hormat kami,
Redaksi Jurnal MKP

2015-01-06 21:07 GMT+07:00 Erna Setijaningrum <erna_set@yahoo.com>:

Kepada : redaksi jurnal mkp

Berikut, saya kirimkan artikel ilmiah untuk bisa dimuat di jurnal MKP. Artikel ini adalah hasil dari penelitian dengan judul "Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan" yang dibiayai oleh DIPA BOPTN

sesuai SK Rektor Unair tentang kegiatan penelitian Unggulan PT, no : 965/UN3/2014, tanggal 28 Februari 2014.

Besar harapan saya agar artikel tersebut bisa dimuat di jurnal MKP, dan apabila ada teknis penulisan yang masih kurang sesuai, akan sy perbaiki

Salam
Erna Setjaningrum
Departemen Administrasi
FISIP - Unair



4. Erna Setjaningrum.doc
94kB

Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Erna Setijaningrum

Korespondensi?

Abstract

The poverty rate is high enough will surely cause various problems, such as unemployment, social issues, education, health, shelter and a polluted environment and other issues. This research aims to make the design of an integrated program to combat poverty in the city of Surabaya in accordance with the needs of the poor. There are 8 pieces of priority needs of the poor, namely; (1) education, (2) Health, (3) housing, (4) the nine basic, (5) Water, (6) Ease of administration, (7) Training expertise, (8) employment. While the agencies that implement integrated programs to reduce poverty there are a number of 9 institutions, namely; (1) Department of Education, (2) Social Service, (3) Department of Labor, (4) Bapemas KB, (5) Department of Human Settlements, (6) taps, (7) Department of Civil and Population, (8) Sub-District and Sub-District, (9) Department of Industry and Trade.

Keywords: ?

Abstrak

Angka kemiskinan yang cukup tinggi tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pengangguran, masalah sosial, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan lingkungan yang kumuh dan permasalahan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain program terpadu untuk memerangi kemiskinan di Kota Surabaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Ada 8 prioritas kebutuhan masyarakat miskin, yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan dasar, (5) air, (6) kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, (8) kerja, sedangkan instansi yang menerapkan program terpadu untuk mengurangi kemiskinan ada sejumlah 9 lembaga, yaitu (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Sosial, (3) Departemen Tenaga Kerja, (4) Bapemas KB, (5) Departemen Pemukiman manusia, (6) PDAM, (7) Departemen Teknik Sipil dan Kependudukan, (8) Kecamatan dan Kelurahan, (9) Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Kata kunci: ?

Pendahuluan

Sebagai kota besar termasuk Surabaya banyak melakukan pembangunan di segala bidang. Meskipun demikian, angka kemiskinan di kota Surabaya masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Surabaya 2011, jumlah keluarga miskin (Gakin) tercatat sebanyak 112.465 kepala keluarga (KK) atau sekitar 449.860 jiwa (dengan asumsi bahwa 1 KK terdiri dari empat jiwa).

Kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Semampir, Kecamatan Tambaksari, dan Kecamatan Simokerto. Kecamatan Semampir terdiri dari 5 kelurahan dengan 60.41% keluarga miskin, Tambaksari terdiri dari 6 kelurahan dengan 12.47% keluarga miskin, sedangkan kecamatan Simokerto terdiri dari 5 kelurahan dengan 41.82% keluarga miskin. Berikut, data prosentase keluarga miskin di Kecamatan Semampir, Tambaksari, dan Simokerto.

Tabel 1.
Prosentase Keluarga Miskin di Kecamatan Semampir, Tambaksari, Simokerto
Tahun 2011

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Keluarga Seluruhnya	Jumlah Keluarga Miskin	Prosentase (%)
1	Semampir	Ampel	5.333	906	6,33
		Sidotopo	8.271	4.937	13,21
		Pegirian	6.610	3.561	10,17
		Wonokusumo	12.244	5.887	18,13
		Ujung	7.485	5.176	12,60
Jumlah			39.943	20.467	60,41
2	Tambaksari	Pacarkeling	7.559	1.537	20,33
		Pacar Kembang	9.469	1.701	17,96
		Ploso	6.376	2.016	31,62
		Tambaksari	3.940	1.142	28,98
		Rangkah	3.863	1.080	27,96
		Gading	24.357	3.037	12,47
Jumlah			55.564	10.513	18,92
3	Simokerto	Kapasan	16.980	692	4,07
		Tambak Rejo	17.668	1.552	8,78
		Simokerto	23.822	1.752	7,35
		Sidodadi	16.080	1.682	10,46
		Simolawang	22.108	2.468	11,16
Jumlah			96.658	8.146	41,82

Sumber : BPS Jatim 2012

Angka kemiskinan yang cukup tinggi tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pengangguran, masalah sosial, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan lingkungan yang kumuh dan permasalahan yang lain.

Sebenarnya berbagai program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya, namun upaya tersebut terlihat masih belum efektif lebih dikarenakan berbagai program kemiskinan yang dikerjakan oleh banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki program sendiri-sendiri. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan tersebut

tidak terfokus dan berlangsung tanpa arah yang jelas. Banyak sekali program yang dilaksanakan berbagai SKPD tersebut saling tumpang tindih atau overlapping, dan tidak saling menunjang. Setidaknya ada dua penyebab tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan, yaitu 1) tidak ada koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, dan 2) program hanya berdasar pada proyek tanpa memperhatikan pada kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, telah dilakukan penelitian yang dilakukan pada 9 kelurahan yang berada di 3 kecamatan. Pemilihan lokasi kelurahan ini berdasar tingginya angka kemiskinan di 3 Kecamatan tersebut, dengan mengambil masing-masing 3 Kelurahan sebagai sampel. Kesembilan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kecamatan Semampir: Kelurahan Sidotopo, Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Ujung; 2) Kecamatan Tambaksari: Kelurahan Ploso, Kelurahan Tambaksari, Kelurahan Rangkah; 3) Kecamatan Simokerto: Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Simolawang.

Selama ini, untuk menanggulangi masalah kemiskinan terdapat delapan instansi yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan yaitu: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), (2) Bapemas dan KB, (3) Dinas Koperasi dan UMKM, (4) Disperindag, (5) Dinas Kesehatan, (6) Dinas Tenaga Kerja, (7) Dinas Sosial, (8) Dispendik. Program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait selama ini, semuanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin secara umum. Dengan demikian tidak ada program khusus yang memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di sejumlah sembilan kelurahan lokasi penelitian (Kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambakrejo, Sidodadi, dan Simolawang) yang secara statistik memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Semua instansi dalam menjalankan programnya selalu memiliki keterkaitan dengan instansi lain, namun keterkaitan ini tidak selalu diikuti dengan adanya koordinasi antara instansi tersebut, bahkan ada beberapa program yang overlapping satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, diperlukan adanya program terpadu untuk pengentasan kemiskinan di kota Surabaya. Program terpadu yang harus disediakan merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan memerlukan keterkaitan dan koordinasi antar instansi, tanpa ada overlapping antar pelaksana program. Untuk merealisasikan program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan kesiapan matang dari pelaksana program atau instansi terkait.

Program terpadu yang harus disediakan tersebut adalah suatu program yang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin. Dengan demikian, rumusan masalah dalam kajian ini adalah program terpadu pengentasan kemiskinan apa sajakah yang paling sesuai bagi kelompok miskin di perkotaan berdasar prioritas kebutuhan mereka?

Desain Program Terpadu

Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk obyek nyata.

Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan berbagai macam aspek lainnya. Datanya didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini adalah pengertian dan definisi desain: 1) menurut Choirul Amin, desain adalah kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, corak; 2) menurut Ken Hurts, desain adalah proses iteratif yang melibatkan banyak aktivitas tinjauan ke belakang dan paralel; 3) menurut Dedi Nurhadiat, desain adalah perencanaan untuk mewujudkan suatu gagasan; 4) menurut Widagdo, desain berkaitan dengan nilai-nilai kontekstual yang menyuarakan kebudayaan; 5) menurut Dudy Wiyancoko, desain adalah segala hal yang berhubungan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing/rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan test riding; 6) menurut Andya Primanda, desain adalah upaya untuk menemukan titik tengah dari segala macam masukan yang seringkali berseberangan; 7) Soekarno & lanawati Basuki, desain adalah pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, seperti busana; 8) menurut Janner Simarmata, desain adalah bagaimana aplikasi yang dirancang menjadi sesuai dengan kebutuhan.

Dari berbagai pendapat tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Desain merupakan langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda, seperti baju, furniture, bangunan, dan lain-lain. Pada saat pembuatan desain biasanya mulai memasukkan unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, cita rasa, dan lain-lain, sehingga bisa dikatakan bahwa sebuah desain

merupakan bentuk perumusan dari berbagai unsur termasuk berbagai macam pertimbangan didalamnya.

Untuk mendefinisikan tentang Program, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bukunya, *Administration of Development Programs and Project, Some Major Issues*, mengemukakan rumusan konseptual mengenai program:

“Program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas” (Tjokroamijoyo 1990).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa program merupakan bentuk operasional dari kebijakan di mana suatu program tersusun secara jelas dan jika masih bersifat umum, maka program harus diterjemahkan secara lebih operasional menjadi proyek. Kejelasan ini diperlukan karena hanya dengan itulah diperoleh kriteria untuk memeriksa dan mengevaluasi tindakan administrasi yang dilakukan oleh birokrasi guna mentransformasikan kebijakan menjadi kegiatan nyata (Wibowo 1994).

Suatu program yang baik paling tidak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: tujuan yang dirumuskan harus jelas, penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin, pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut, hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya: suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri, berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (Tjokroamidjoyo 1990).

Untuk mendapatkan desain program terpadu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya koordinasi antar pelaksana. Banyak ahli mendefinisikan pemahaman tentang koordinasi dengan memberi pendapat yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni bahwa koordinasi adalah asas umum dalam semua organisasi atau dapat dikatakan koordinasi adalah asas pokok organisasi.

Mooney dalam Sutarto (1998) mengemukakan bahwa pengertian koordinasi adalah “The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of common purpose”. Dengan demikian, Mooney memandang bahwa koordinasi merupakan suatu

pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Pengaturan usaha kelompok atau organisasi memang diperlukan, mengingat organisasi terdiri atas sejumlah unit kerja yang berlainan fungsi namun diikat oleh satu kesatuan tujuan tertentu.

Selaras dengan pendapat Mooney, Benn dalam Sutarto (1998) mengatakan bahwa "Coordination: A Continuous, harmonious action toward the objectives, attained through leadership, organization, and administration; The arrangement of group efforts in a continuous and orderly manner so as to provide unification of action in the pursuit of a common goal."

Dari pendapat tersebut diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa koordinasi suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan, yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi, serta koordinasi juga dipandang sebagai suatu penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

Instansi Terkait Berdasar Prioritas Kebutuhan Kelompok Miskin

Secara umum, terdapat sejumlah delapan prioritas kebutuhan bagi kelompok miskin yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan, (4) sembilan bahan pokok, (5) Air bersih, (6) Kemudahan administrasi, (7) Pelatihan keahlian, (8) Lapangan pekerjaan, sedangkan instansi yang terlibat dalam penanganannya bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Instansi yang Terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan

No	Prioritas Kebutuhan	Instansi Terkait
1	Pendidikan	a. Dinas Pendidikan b. Dinas Sosial c. Dinas Tenaga Kerja
2	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial 3. Bapemas KB
3	Perumahan	1. Dinas Cipta Karya 2. Dinas Sosial 3. Dinas Kesehatan
4	Sembilan bahan pokok	1. Bapemas dan KB 2. Dinas Sosial 3. Dinas Kesehatan
5	Air bersih	1. Dinas Kesehatan 2. PDAM

6	Kemudahan Administrasi	1. Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan 2. Kelurahan dan Kecamatan
7	Pelatihan Keahlian	1. Dinas Sosial 2. Disperindag 3. Bappemas dan KB
8	Lapangan kerja	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Hasil olah data lapangan

Dari tabel 2, terlihat bahwa instansi yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah: (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Sosial, (3) Dinas Tenaga Kerja, (4) Bapemas KB, (5) Dinas Cipta Karya, (6) PDAM, (7) Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, (8) Kelurahan dan Kecamatan, (9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Metode Penelitian ?

Hasil dan Pembahasan

Program Terpadu Spesifik Bagi Kelompok Miskin

Dari hasil kajian yang telah dilaksanakan, terdapat program spesifik (program yang memang dikhususkan bagi kelompok miskin) di kota Surabaya yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait, namun terdapat pula usulan program yang menurut berbagai instansi terkait akan bisa menambah efektifnya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Berikut adalah program-program yang telah teridentifikasi:

Tabel 3.
Program Terpadu Spesifik untuk Pengentasan Kemiskinan

No	Prioritas Kebutuhan	Instansi	Program spesifik yang telah dilaksanakan	Usulan program spesifik
1	Pendidikan	Dispendik	Bantuan Siswa Miskin (BSM)	
			Beasiswa sekolah perkapalan	
			Pembinaan SD, SMP dan SMA terbuka	
		Dinsos	Bantuan Pemberian Seragam dan Alat Tulis	
				Beasiswa Unggulan Kalijudan
2	Kesehatan	Dinkes	Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin	

			(Jamkesmas Non Kuota) dan Jampersal	
		Dinsos	Khitan Masal Anak dari Keluarga Tidak Mampu	
		Bapemas dan KB	Penyediaan dan pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin	
3	Perumahan	Dinas Cipta Karya	Bedah Rumah / Rehabilitasi Rumah	
		Dinas Sosial	Fasilitasi dan pendampingan lingkungan rumah	Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)
4	Sembilan Bahan Pokok	Bapemas dan KB	Tim Koordinasi Program Beras Miskin	
		Dinas Sosial	Penyediaan bahan makan sehat bagi balita keluarga miskin (protein telur)	
5	Air Bersih	PDAM	Penyediaan air bersih	
6	Kemudahan Administrasi	Discapilduk	fasilitas pengurusan akte kelahiran	
7	Pelatihan Keahlian	Bapemas dan KB	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Keluarga Miskin	
8	Lapangan kerja	Disnaker	Pendampingan dan pemilihan Bidang Kerja Bagi Calon Lulusan SMA / SMK / MA kelompok miskin	

Sumber: Hasil olah data

Dari tabel 3, secara umum bisa diidentifikasi sebagai berikut: Prioritas kebutuhan pendidikan bagi kelompok miskin terdapat sejumlah empat program spesifik yang telah dilaksanakan. Sejumlah tiga program dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan satu program dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Prioritas kebutuhan kesehatan bagi kelompok miskin terdapat sejumlah tiga program spesifik yang telah dilaksanakan. Masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapemas dan KB, sedangkan Dinas Sosial mengusulkan 2 buah program lagi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin.

Prioritas kebutuhan perumahan bagi kelompok miskin terdapat sejumlah dua program spesifik yang telah dilaksanakan. Masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Dinas Sosial. Sedangkan Dinas Sosial mengusulkan 1 buah program lagi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin. Prioritas kebutuhan sembilan bahan pokok bagi kelompok miskin; terdapat sejumlah dua program spesifik yang telah dilaksanakan. Masing-masing

dilaksanakan oleh Bapemas KB dan Dinas Sosial. Prioritas kebutuhan air bersih bagi kelompok miskin; terdapat sejumlah satu program spesifik yang dilaksanakan oleh PDAM.

Prioritas kebutuhan kemudahan administrasi bagi kelompok miskin terdapat sejumlah satu program spesifik yang dilaksanakan oleh Discapilduk. Prioritas kebutuhan pelatihan keahlian bagi kelompok miskin terdapat sejumlah satu program spesifik yang dilaksanakan oleh Bapemas dan KB. Prioritas kebutuhan lapangan kerja bagi kelompok miskin terdapat sejumlah satu program spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja

Simpulan

Tiap-tiap instansi harus lebih fokus pada program-program spesifik penanggulangan kemiskinan, di mana program tersebut harus benar-benar diperuntukkan bagi kelompok miskin. Dengan demikian, setiap tahun akan muncul usulan program spesifik yang pada akhirnya program tersebut akan efektif menanggulangi kemiskinan di perkotaan.

Daftar Pustaka

Benn dalam Sutarto (1998)

Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen (1982) *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc

Bintarto, R, Prof (1993) *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Galia Indonesia.

Kartasamita, (1996) *Pemberdayaan : Pembangunan Berwajah Manusia*, Raja Grafindo Persada

Khudori, Darwis (1995) *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta, PPSK

Lewis, Oscar (2004) "Kebudayaan Kemiskinan", dalam *Kemiskinan di Perkotaan* (di-edit oleh Parsudi Suparlan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan.

Lipton, Michael (1977) *Urbanitation in the Modern World*, London: Faber and Faber.

Miles, Matthew B dan Michael A. Huberman (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta-Ui Press.

Mooney dalam Sutarto (1998)

Prawirakusuma, Soeharto (2001) *Ekonomi Rakyat*, University Gadjah Mada Press

Proserpina, D (2003) *Empowerment & Development*, University of the Philippines Press

Sudjatmoko, (2003) *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Sumodiningrat, Gunawan (1999) *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Tjokroamidjoyo (1990)

Wibowo (1994)

Internet:

www.wikipedia.com (diakses tgl 15 Desember 2013)

www.kemiskinankota.com (diakses tgl 15 Desember 2013)
<http://indos.org.cuhn>. (diakses tgl 23 Desember 2013)

Re: Artikel

From: Erna Setijaningrum (erna_set@yahoo.com)

To: erna_set@yahoo.com

Date: Wednesday, 28 December 2016, 02:59 pm GMT+7

Revisi paper

Ass

Mbak Uud, berikut saya kirim ulang lagi paper yang dulu sudah di review oleh pengurus JMKP. Revisi sebenarnya sudah saya email pada tanggal 5 Oktober yang lalu, namun sesuai permintaan mbak Uud ini saya kirim ulang lagi

Wassalam

Matur nuwun

On Wednesday, 5 October 2016, 17:24, Erna Setijaningrum <erna_set@yahoo.com> wrote:

Kepada Yth :
Pengurus Jurnal MKP

Ass .. berikut, makalah yang sudah saya revisi sesuai dengan catatan-catatan / koreksi dari editor jurnal dengan judul "Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya".

Terima kasih
Erna

On Tuesday, 9 August 2016, 11:12, Masyarakat Kebudayaan Politik <mkpsurabaya@gmail.com> wrote:

YTH Ibu Erna

Untuk revisi, karena akan segera diterbitkan, kami mohon untuk mengirim kembali artikel yang telah diperbaiki, selambat-lambatnya Jumat, 12 Agustus 2016.

Terima kasih

2016-08-09 11:09 GMT+07:00 Masyarakat Kebudayaan Politik
<mkpsurabaya@gmail.com>:

YTH Ibu Erna.

Artikel anda sudah kami revisi, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu tidak ada korespondensi dan kata kunci, metode penelitian tidak ada dan dalam daftar pustaka mohon dilakukan kroscek lagi antara sitasi yang ada di badan artikel dan yang ada di daftar pustaka.

Terima kasih. Salam Redaksi

2016-07-27 13:29 GMT+07:00 Erna Setijaningrum <erna_set@yahoo.com>:

Sebelumnya, terima kasih telah diberikan informasi ini. Dengan senang hati saya menyatakan kesediaan bahwa artikel tersebut diterbitkan untuk edisi April - Juni 2015. Artikel tersebut belum pernah diterbitkan di jurnal lain.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya

Erna

On Tuesday, 26 July 2016, 20:56, Masyarakat Kebudayaan Politik <mkpsurabaya@gmail.com> wrote:

Yth Erna Setijaningrum

Kami telah menerima dengan baik artikel anda yang berjudul "Desain Program terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" tertanggal 6 Januari 2015

Kami berencana menerbitkan artikel ini untuk MKP 28-2 yakni edisi April-Juni 2015 Apakah artikel ini telah diterbitkan di jurnal lain dan apakah anda bersedia jika artikel ini diterbitkan untuk edisi April-Juni 2015? Kami tunggu konfirmasinya. Terimakasih.

Salam Redaksi

2015-03-21 11:00 GMT+07:00 Masyarakat Kebudayaan Politik <mkpsurabaya@gmail.com>:

Yth. Ibu Erna Setijaningrum,

Terima kasih, dan saat ini artikel anda sedang dalam proses review.

Hormat kami,
Redaksi Jurnal MKP

2015-01-06 21:07 GMT+07:00 Erna Setijaningrum <erna_set@yahoo.com>:

Kepada : redaksi jurnal mkp

Berikut, saya kirimkan artikel ilmiah untuk bisa dimuat di jurnal MKP. Artikel ini adalah hasil dari penelitian dengan judul "Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan" yang dibiayai oleh DIPA BOPTN sesuai SK Rektor Unair tentang kegiatan penelitian Unggulan PT, no : 965/UN3/2014, tanggal 28 Februari 2014.

Besar harapan saya agar artikel tersebut bisa dimuat di jurnal MKP, dan apabila ada teknis penulisan yang masih kurang sesuai, akan sy perbaiki

Salam
Erna Setijaningrum
Departemen Administrasi
FISIP - Unair



Program Terpadu - Revisi (2).docx
39.4kB

Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya

**Erna Setijaningrum
(FISIP Unair, erna_set@yahoo.com)**

Abstract

The purpose of this study is to design an integrated program in reducing poverty in the city of Surabaya. Surabaya is one of the big city that still have relatively high poverty rate that would cause complex problems in society, such as unemployment, education, health, crime and social problems. Actually, the program used to addressing poverty have been carried out by local government agencies in Surabaya. But the program is still less effective because: 1) there is no inter-agency coordination in implementing poverty reduction programs, and 2) the poverty reduction programs do not reflect the needs of the poor. The results of this study indicate that there are eight priority needs of the poor, namely (1) education, (2) health, (3) housing, (4) nine basic needs, (5) clean water, (6) ease of administration, (7) training expertise, and (8) employment. Of the eight priority needs of the poor are found to design an integrated program of poverty reduction requires good coordination between relevant agencies. There are nine agencies must coordinate the integrated program, namely (1) the Department of Education, (2) Social Service, (3) the Ministry of Labour, (4) Bapemas KB, (5) the Department of Human settlement, (6) PDAM, (7) Department of Civil and Population, (8) the District and Sub-District, and (9) of the Ministry of Industry and Trade.

Keywords: Integrated Programme, Poverty Reduction, Coordination, Priority Needs the Poor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuatdesain program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya.Surabaya merupakan salah satu kota besar yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yang akan menimbulkan masalah komplek seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, dan masalah sosial. Sebenarnya sudah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemkot Surabaya. Namun program tersebut masih kurang efektif karena : 1) tidak ada koordinasi antar instansi dalam menjalankan program dan 2) program tersebut tidak merefleksikan kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan prioritas kebutuhan kelompok miskin yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan kebutuhan pokok, (5) air bersih, (6) kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, dan (8) lapangan kerja. Dari kedelapan kebutuhan prioritas kelompok miskin tersebut ditemukan desain program terpadu penanggulangan kemiskinan yang mensyaratkan adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait. Instansi yang harus melakukan koordinasi yaitu dalam program terpadu tersebut sejumlah 9 instansi yaitu (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Sosial, (3) Departemen Tenaga Kerja, (4) Bapemas KB, (5) Departemen Pemukiman manusia, (6) PDAM, (7) Departemen Teknik Sipil dan Kependudukan, (8) Kecamatan dan Kelurahan, dan (9) Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Kata kunci: Program Terpadu, Penanggulangan Kemiskinan, Koordinasi, Kebutuhan Prioritas Kelompok Miskin

A. Pendahuluan

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin di kota Surabaya pada tahun 2009 sebanyak 171.200 jiwa, tahun 2010 sebanyak 195.700 jiwa, tahun 2011 sebanyak 183.300 jiwa, tahun 2012 sebanyak 175.100 jiwa, dan tahun 2013 sebanyak 168.690 jiwa. Bila dilihat dari prosentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di kota Surabaya, maka prosentase penduduk miskin di kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 6.72%, tahun 2010 sebesar 7.07%, tahun 2011 sebesar 6.58%, tahun 2012 sebesar 6.23%, tahun 2013 sebesar 5.97%.

Kemiskinan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks di masyarakat. Banyaknya orang miskin yang menganggur atau hanya memiliki penghasilan yang kurang, akan menyebabkan orang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarganya. Akibatnya, keluarga miskin menjadi kurang sehat atau sakit-sakitan karena kekurangan gizi dan nutrisi. Keluarga miskin juga akan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena anak-anak mereka ikut mencari nafkah membantu beban keluarga. Akibat selanjutnya, banyak anak-anak dari keluarga miskin yang turun atau bahkan hidup di jalanan. Kemiskinan juga mengakibatkan kriminalitas yang terjadi sebagai akibat tidak tercukupinya kebutuhan hidup orang miskin yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu yang seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan. Akibat lebih jauh lagi dari masalah kemiskinan adalah masalah sosial seperti tidak diterimanya kelompok miskin ini di masyarakat karena dianggap “menggangu”.

Kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Semampir, Kecamatan Tambaksari, dan Kecamatan Simokerto. Kecamatan Semampir terdiri dari 5 kelurahan dengan 60.41% keluarga miskin, Tambaksari terdiri dari 6 kelurahan dengan 12.47% keluarga miskin, sedangkan kecamatan Simokerto terdiri dari 5 kelurahan dengan 41.82% keluarga miskin.

Berikut, data prosentase keluarga miskin di Kecamatan Semampir, Tambaksari, dan Simokerto.

Tabel 1
Prosentase Keluarga Miskin
di Kecamatan Semampir, Tambaksari, Simokerto

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Keluarga Seluruhnya	Jumlah Keluarga Miskin	Prosentase (%)
1	Semampir	Ampel	5.333	906	6,33
		Sidotopo	8.271	4.937	13,21
		Pegirian	6.610	3.561	10,17
		Wonokusumo	12.244	5.887	18,13
		Ujung	7.485	5.176	12,60
Jumlah			39.943	20.467	60,41
2	Tambaksari	Pacarkeling	7.559	1.537	20,33
		Pacar Kembang	9.469	1.701	17,96
		Ploso	6.376	2.016	31,62
		Tambaksari	3.940	1.142	28,98
		Rangkah	3.863	1.080	27,96
		Gading	24.357	3.037	12,47
Jumlah			55.564	10.513	18,92
3	Simokerto	Kapasan	16.980	692	4,07
		Tambak Rejo	17.668	1.552	8,78
		Simokerto	23.822	1.752	7,35
		Sidodadi	16.080	1.682	10,46
		Simolawang	22.108	2.468	11,16
Jumlah			96.658	8.146	41,82

Sumber : BPS Jatim 2012

Dari table terlihat bahwa dari 3 Kecamatan tersebut, 3 kelurahan dari masing-masing kecamatan yang memiliki angka kemiskinan tinggi adalah 1) Kecamatan Semampir (Kelurahan Sidotopo, Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Ujung), 2) Kecamatan Tambaksari (Kelurahan Ploso, Kelurahan Tambaksari, Kelurahan Rangkah), dan 3) Kecamatan Simokerto (Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Simolawang).

Sebenarnya berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya. Instansi terkait yang telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana / Bapemas KB, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan / Disperindag, Dinas Kesehatan / Dinkes,

Dinas Tenaga Kerja / Disnaker, Dinas Sosial / Dinsos, dan Dinas Pendidikan / Dispendik.

Namun demikian upaya penanggulangan kemiskinan tersebut terlihat masih belum efektif. Hal ini lebih dikarenakan berbagai program kemiskinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya tidak saling terkoordinasi. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan tersebut tidak terfokus pada satu arah. Banyak sekali program yang dilaksanakan berbagai SKPD tersebut saling tumpang tindih atau *overlapping* dan tidak saling menunjang. Ada dua penyebab utama tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan yaitu 1) tidak ada koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, dan 2) program penanggulangan kemiskinan tersebut masih belum merefleksikan kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya program terpadu untuk penanggulangan kemiskinan di kota Surabaya. Program terpadu yang harus disediakan merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan memerlukan keterkaitan / koordinasi antar instansi, tanpa ada *overlapping* antar pelaksana program. Program terpadu yang harus disediakan tersebut adalah suatu program yang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin untuk memenuhi *basic need* nya sehingga bisa hidup layak.

Kelompok miskin di Kota Surabaya termasuk kategori kemiskinan perkotaan. Beban orang miskin di perkotaan akan lebih berat daripada beban orang miskin di perdesaan. Orang miskin perkotaan harus menghadapi persaingan hidup yang sangat keras di tengah-tengah pembangunan perkotaan. Orang miskin perkotaan akan kalah bersaing dalam kesempatan lapangan pekerjaan. Orang miskin perkotaan juga harus menanggung biaya hidup yang sangat mahal di kota. Oleh karena itu, kelompok miskin di perkotaan akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) nya agar bisa hidup layak.

Penelitian ini ingin mengetahui program terpadu penanggulangan kemiskinan apa sajakah yang paling sesuai bagi kelompok miskin di Kota Surabaya berdasar prioritas kebutuhan / *basic need* mereka untuk hidup layak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan metode kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana, kapan, dimana, dan suasana dari sesuatu yang diteliti (Bruce L Berg, 2000). Penelitian dilaksanakan pada instansi-instansi yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Bapemas dan KB, Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dispendik dan PDAM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Robert, 2010). Dalam penelitian ini kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Lexy J Moleong, 2008). Agar analisa data secara kualitatif ini dapat memperoleh keteraturan dan sistematis, maka dilakukan tiga alur kegiatan yang harus diikuti yaitu (Miles dan Huberman 1992) yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hill (dalam Ruth Lister, 2004), kemiskinan diartikan dimana orang tersebut dapat membeli apa yang mereka butuhkan namun tidak mampu membeli benda yang kebanyakan orang dapat membeli atau mereka tidak bisa makan dan hidup tanpa mendapatkan hutang. Kemudian Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan konsumsi bahwa orang dapat dikatakan miskin jika seseorang tersebut tidak dapat membeli makanan sesuai dengan standar gizi yang diperlukan oleh anak-anak (David Gordon dkk, 2003). UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa masalah kemiskinan bersifat multidimensi. Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan juga dikarenakan kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar (*basic needs*) dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Selanjutnya Bappenas (dalam Arius Jonaedi, 2012) mendefinisikan kemiskinan secara lebih komprehensif, dengan melihat kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang dalam memenuhi kebutuhan minimum seperti pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kebutuhan prioritas kelompok miskin yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan bahan pokok, (5) air bersih, (6) kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, (8) lapangan pekerjaan. Bisa disimpulkan bahwa kelompok miskin menempatkan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan sebagai tiga prioritas kebutuhan teratas.

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah kota Surabaya telah melaksanakan berbagai program terutama yang berhubungan dengan 3 prioritas kebutuhan kelompok miskin yaitu program yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bukunya, *Administration of Development Programs and Project, Some Major Issues*, mengemukakan bahwa “Program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau

aktivitas” (Tjokroamidjoyo, 1990). Suatu program yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (1) tujuan yang jelas, (2) penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, (3) kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin, (4) pengukuran *cost benefit* yang akan dihasilkan program tersebut, (5) hubungan dengan kegiatan atau program lainnya (Tjokroamidjoyo 1990).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi tidak saling mendukung, bahkan terdapat tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini memperlihatkan bahwa program penanggulangan kemiskinan masih belum memiliki tujuan yang jelas. Terdapat sejumlah 4 program yang dalam pelaksanaannya saling *overlapping*, yaitu :

- Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin oleh Bapemas *overlapping* dengan pelatihan handcraft, menjahit dan tata boga oleh Dinas Sosial. Kedua program tersebut pada intinya adalah sama yaitu memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat handcraft dan lain-lain yang sarannya adalah perempuan keluarga miskin.
- PMT atau Bantuan Makanan untuk Lansia yang dilakukan oleh Dinas Sosial *overlapping* dengan Program Pemberian Snack Lansia oleh Dinas Kesehatan. Pada dasarnya kedua program ini bertujuan sama yaitu perbaikan gizi pada Lansia.
- Pendidikan Lanjutan Siswa Bermasalah Sosial oleh Disnaker *overlapping* dengan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pondok Sosial Anak Wonorejo oleh Dinsos. *Overlapping* dalam pelaksanaan program ini terjadi karena memang tidak ada koordinasi antara kedua instansi karena kedua instansi memiliki kriteria tersendiri dalam penentuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga sasaran dan target dari program ini tergantung masing – masing instansi.
- Fasilitasi Pengembangan Kelompok Usaha Skala Mikro-kecil oleh Dinas Koperasi dan UMKM *overlapping* dengan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro oleh Bapemas. Kedua program ini memiliki

kegiatan yang sama yaitu menyewakan stan untuk membantu pemasaran hasil usaha skala mikro.

Penyebab *overlapping* nya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh instansi terkait lebih dikarenakan tidak adanya koordinasi. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Surabaya, setidaknya terdapat delapan instansi yang terlibat yaitu: (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana / Bapemas KB, (2) Dinas Koperasi dan UMKM, (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan / Disperindag, (4) Dinas Kesehatan / Dinkes, (5) Dinas Tenaga Kerja / Disnaker, (6) Dinas Sosial / Dinsos, dan (7) Dinas Pendidikan / Dispendik. Dalam mengatasi kemiskinan, beberapa instansi memiliki keterkaitan dengan instansi lain untuk melaksanakan beberapa programnya. Namun demikian, tidak semua instansi tersebut melakukan koordinasi meskipun programnya saling terkait. Berikut, adalah table yang menunjukkan keterkaitan instansi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Surabaya berdasar prioritas kebutuhan kelompok miskin.

Tabel 2
Keterkaitan dan Koordinasi
Program – Program Penanggulangan Kemiskinan
Antar Instansi

No	Instansi	Instansi Terkait	Koordinasi
1	Bapemas	Dinas Koperasi dan UMKM	Ya
		Disperindag	Ya
		Dinsos	Tidak
		Dinas Tenaga Kerja	Tidak
		Dispendik	Ya
2	Dinas Koperasi dan UMKM	Disperindag	Ya
		Dinkes	Tidak
		Bapemas	Ya
3	Disperindag	Dinas Koperasi dan UMKM	Ya
		Bapemas	Ya
4	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja	Tidak
		Bapemas	Tidak
		Dinkes	Tidak
5	Dinas Tenaga	Dispendik	Tidak

	Kerja	Bapemas	Tidak
		Dinas Sosial	Tidak
6	Dinas Pendidikan	Bapemas	Ya
		Dinas Tenaga Kerja	Tidak
7	Dinas Kesehatan	Dinas koperasi dan UMKM	Ya
		Dinsos	Ya

Sumber : hasil olah data

Dari table tersebut terlihat bahwa meskipun program penanggulangan yang dilaksanakan oleh suatu instansi selalu terkait dengan instansi yang lain, namun hampir sebagian besar tidak melakukan koordinasi. Hal inilah yang menyebabkan seringkali terjadi *overlapping* program penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya menyebabkan program tersebut kurang efektif.

Untuk itulah diperlukan program terpadu antar instansi agar penanggulangan kemiskinan menjadi efektif. Untuk mendapatkan program terpadu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya koordinasi antar pelaksana. Banyak ahli mendefinisikan pemahaman tentang koordinasi dengan memberi pendapat yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni bahwa koordinasi adalah asas umum dalam semua organisasi atau dapat dikatakan koordinasi adalah asas pokok organisasi. Mooney (dalam Sutarto,1998) mengemukakan bahwa pengertian koordinasi adalah “*The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of common purpose*”. Dengan demikian, Mooney memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Pengaturan usaha kelompok atau organisasi memang diperlukan, mengingat organisasi terdiri atas sejumlah unit kerja yang berlainan fungsi namun diikat oleh satu kesatuan tujuan tertentu. Selaras dengan pendapat Mooney, Benn (dalam Sutarto,1998) mengatakan bahwa “*Coordination: A Continuous, harmonious action toward the objectives, attained through leadership, organization, and administration; The arrangement of group efforts in a continuous and orderly manner so as to provide unification of action in the pursuit of a common goal.*” Dari pendapat tersebut diperoleh suatu konsep

pemahaman bahwa koordinasi adalah suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan, yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi, serta koordinasi juga dipandang sebagai suatu penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

Dari hasil penelitian ini telah disusun program terpadupenanggulangan kemiskinan yang mensyaratkan adanya keterkaitan dan koordinasi antar instansi. Program terpadu ini disusun berdasarkan prioritas kebutuhan kelompok miskin yang disinkronisasikan dengan berbagai program baik yang telah dilaksanakan maupun berupa usulan dari masing-masing instansi. Berikut adalah program-program yang telah teridentifikasi:

Tabel 3.
Program Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan
Berdasar Kebutuhan Prioritas Kelompok Miskin

No	Prioritas Kebutuhan	Instansi Terkait	Program
1	Pendidikan	Dispendik	Bantuan Siswa Miskin (BSM)
			Beasiswa sekolah perkapalan
			Pembinaan SD, SMP dan SMA terbuka
		Dinsos	Bantuan Pemberian Seragam dan Alat Tulis
2	Kesehatan	Dinkes	Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Jamkesmas Non Kuota) dan Jampersal
		Dinsos	Khitan Masal Anak dari Keluarga Tidak Mampu
		Bapemas dan KB	Penyediaan dan pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
3	Perumahan	Dinas Cipta Karya	Bedah Rumah / Rehabilitasi Rumah
		Dinas Sosial	Fasilitasi dan pendampingan lingkungan rumah
4	Sembilan Bahan Pokok	Bapemas dan KB	Tim Koordinasi Program Beras Miskin
		Dinas Sosial	Penyediaan bahan makan sehat bagi balita keluarga miskin (protein telur)
5	Air bersih	PDAM	Penyediaan air bersih
6	Kemudahan Administrasi	Discapilduk	Fasilitas pengurusan akte kelahiran
7	Pelatihan Keahlian	Bapemas dan KB	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Keluarga Miskin
8	Lapangan kerja	Disnaker	Pendampingan dan pemilihan Bidang

			Kerja Bagi Calon Lulusan SMA / SMK / MA kelompok miskin
--	--	--	---

Sumber: Hasil olah data

Dari tabel tersebut bisa dijelaskan bahwa program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya dilaksanakan oleh sejumlah sembilan instansi terkait sebagai berikut :

- Prioritas kebutuhan pendidikan; terdapat sejumlah empat (4) program dengan rincian tiga (3) program dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan satu (1) program dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- Prioritas kebutuhan kesehatan ; terdapat sejumlah tiga (3) program yang masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapemas dan KB.
- Prioritas kebutuhan perumahan ; terdapat sejumlah dua (2) program yang masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Dinas Sosial.
- Prioritas kebutuhan sembilan bahan pokok; terdapat sejumlah dua (2) program yang masing-masing dilaksanakan oleh Bapemas KB dan Dinas Sosial.
- Prioritas kebutuhan air bersih; terdapat sejumlah satu (1) program yang dilaksanakan oleh PDAM.
- Prioritas kebutuhan kemudahan administrasi; terdapat sejumlah satu (1) program yang dilaksanakan oleh Discapilduk.
- Prioritas kebutuhan pelatihan keahlian; terdapat sejumlah satu (1) program yang dilaksanakan oleh Bapemas dan KB
- Prioritas kebutuhan lapangan kerja; terdapat sejumlah satu (1) program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja

D. Penutup

Penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya bisa efektif terlaksana bila menggunakan program terpadu. Tiap-tiap instansi di Kota Surabaya merancang

program-program penanggulangan kemiskinan yang memiliki keterkaitan dan koordinasi dengan instansi lain. Program tersebut juga harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan kelompok miskin untuk bisa hidup layak di perkotaan. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pembuatan program terpadu penanggulangan kemiskinan yaitu :

- Melakukan *need assessment* terhadap *basic need* / kebutuhan prioritas kelompok miskin untuk dijadikan sebagai usulan program
- Sinkronisasi / melakukan pemetaan masing-masing program dengan instansi terkait. Beberapa program yang *overlapping* harus dipangkas dan dilaksanakan oleh instansi yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pelaksana.
- Melakukan koordinasi antar instansi terkait mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, hingga evaluasi program

DAFTAR PUSTAKA

- Arius Jonaidi (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1, No. 1, April 2012 hal.: 140-164
- Berg, Bruce, L., (2000). *Qualitative research methods for the social sciences: Seventh Edition.*, Sydney: Allyn and Bacon
- Gordon, David, Shailen Nandy, Christina Pantazis, Simon Pemberton dan Peter Townsend. (2003). *Child Poverty in the Developing World*. UK : The Policy Press
- Lexy J. Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Lister, Ruth. (2004). *Poverty*. Cambridge : Polity Press
- Miles, Matthew B dan Michael A. Huberman, (1992)., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta-Ui Press.
- Stake, Robert (2010), *Qualitative Research*, The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. 72 Spring Street, New York, NY 10012
- Sutarto. (1998). *Dasar- Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1990). *Perencanaan Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta

Perbaikan artikel

From: Erna Setijaningrum (erna_set@yahoo.com)

To: mkpsurabaya@gmail.com

Date: Sunday, 12 February 2017, 09:36 am GMT+7

Kepada YTH :
Pengurus jurnal MKP

Salam

Berikut, saya kirimkan perbaikan artikel. Sudah saya perbaiki sesuai dengan saran reviewer agar memperbaiki metode penelitian sesuai yang dilaksanakan di lapangan.

Mohon juga diberi tambahan di judul (ditambahi footnote) : "Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi / PUPT, didanai DIKTI, 2014"

Terima kasih atas perhatiannya

Erna



Program Terpadu - Revisi (3).docx
40.8kB

Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya

Integrated program to overcome poverty in Surabaya

Erna Setijaningrum

Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga, Surabaya
Email: erna_set@yahoo.com

Abstract

This research aims to design an integrated program in reducing poverty in Surabaya. Surabaya is one of the major cities that have relatively high poverty rate that would lead to complex problems such as unemployment, education, health, crime and social problems. Actually, a lot of poverty alleviation programs implemented by the government of Surabaya. However, the program is still less effective because: 1) there is no coordination among agencies in running the program and 2) the program does not reflect the needs of the poor to a decent life in urban areas. The results of this study indicate that there are eight priority needs of the poor, namely (1) education, (2) health, (3) housing, (4) nine basic needs, (5) clean water, (6) ease of administration, (7) training expertise, and (8) employment. From the eight priority needs of the poor, we found design of integrated program of poverty reduction which requires good coordination among relevant agencies. There are eight institutions which government agency should coordinate in the integrated program, namely (1) the Department of Education, (2) Social Service, (3) Departemen of Health, (4) the Ministry of Community Empowerment, (5) Department of housing, planning, and urban development (6) Water Supply Company, (7) Department of Civil and Population, (8) the Ministry of Labour

Keywords: Integrated Programme, Poverty Reduction, Coordination, The Priority Needs of The Poor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota besar yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yang akan menimbulkan masalah kompleks seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, dan masalah sosial. Sebenarnya sudah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. Namun program tersebut masih kurang efektif karena : 1) tidak ada koordinasi antar instansi dalam menjalankan program dan 2) program tersebut tidak merefleksikan kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan. Penelitian dilaksanakan pada instansi-instansi yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Bapemas dan KB, Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dispendik dan PDAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan prioritas kebutuhan kelompok miskin yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan kebutuhan pokok, (5) air bersih, (6) kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, dan (8) lapangan kerja. Dari kedelapan kebutuhan prioritas kelompok miskin tersebut ditemukan desain program terpadu penanggulangan kemiskinan yang mensyaratkan adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait. Instansi yang harus melakukan koordinasi dalam program terpadu tersebut sejumlah delapan instansi yaitu (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Sosial, (3) Dinas Kesehatan, (4) Bapemas dan KB, (5) Dinas Cipta Karya, (6) PDAM, (7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (8) Dinas Tenaga Kerja

Kata kunci: program terpadu, penanggulangan kemiskinan, koordinasi, kebutuhan prioritas kelompok miskin

Pendahuluan

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin di kota Surabaya pada tahun 2009 sebanyak 171.200 jiwa, tahun 2010 sebanyak 195.700 jiwa, tahun 2011 sebanyak 183.300 jiwa, tahun 2012 sebanyak 175.100 jiwa, dan tahun 2013 sebanyak 168.690 jiwa. Apabila dilihat dari prosentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di Kota Surabaya, maka prosentase penduduk miskin di kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 6.72%, tahun 2010 sebesar 7.07%, tahun 2011 sebesar 6.58%, tahun 2012 sebesar 6.23%, tahun 2013 sebesar 5.97%.

Kemiskinan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks di masyarakat. Banyaknya orang miskin yang menganggur atau hanya memiliki penghasilan yang kurang, akan menyebabkan orang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarganya. Akibatnya, keluarga miskin menjadi kurang sehat atau sakit-sakitan karena kekurangan gizi dan nutrisi. Keluarga miskin juga akan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena anak-anak mereka ikut mencari nafkah membantu beban keluarga. Akibat selanjutnya, banyak anak-anak dari keluarga miskin yang turun atau bahkan hidup di jalanan. Kemiskinan juga mengakibatkan kriminalitas yang terjadi sebagai akibat tidak tercukupinya kebutuhan hidup orang miskin yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu yang seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan. Akibat lebih jauh lagi dari masalah kemiskinan adalah masalah sosial seperti tidak diterimanya kelompok miskin ini di masyarakat karena dianggap “mengganggu”.

Kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Semampir, Kecamatan Tambaksari, dan Kecamatan Simokerto. Kecamatan Semampir terdiri dari 5 kelurahan dengan 60.41% keluarga miskin, Tambaksari terdiri dari 6 kelurahan dengan 12.47% keluarga miskin, sedangkan kecamatan Simokerto terdiri dari 5 kelurahan dengan 41.82% keluarga miskin. Berikut, data prosentase keluarga miskin di Kecamatan Semampir, Tambaksari, dan Simokerto.

Tabel 1
Prosentase Keluarga Miskin di Kecamatan Semampir, Tambaksari, Simokerto

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Keluarga Seluruhnya	Jumlah Keluarga Miskin	Prosentase (%)
1	Semampir	Ampel	5.333	906	6,33
		Sidotopo	8.271	4.937	13,21
		Pegirian	6.610	3.561	10,17
		Wonokusumo	12.244	5.887	18,13
		Ujung	7.485	5.176	12,60
		Jumlah		39.943	20.467
2	Tambaksari	Pacarkeling	7.559	1.537	20,33
		Pacar Kembang	9.469	1.701	17,96
		Ploso	6.376	2.016	31,62
		Tambaksari	3.940	1.142	28,98
		Rangkah	3.863	1.080	27,96
		Gading	24.357	3.037	12,47
Jumlah		55.564	10.513	18,92	
3	Simokerto	Kapasan	16.980	692	4,07
		Tambak Rejo	17.668	1.552	8,78
		Simokerto	23.822	1.752	7,35
		Sidodadi	16.080	1.682	10,46

	Simolawang	22.108	2.468	11.16
Jumlah		96.658	8.146	41.82

Sumber : BPS Jatim 2012

Dari tabel 1 terlihat bahwa 3 kelurahan dari masing-masing kecamatan yang memiliki angka kemiskinan tinggi adalah: 1) Kecamatan Semampir (Kelurahan Sidotopo, Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Ujung), 2) Kecamatan Tambaksari (Kelurahan Ploso, Kelurahan Tambaksari, Kelurahan Rangkah), dan 3) Kecamatan Simokerto (Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Simolawang).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya. Instansi terkait yang telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana/Bapemas KB, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Disperindag, Dinas Kesehatan/Dinkes, Dinas Tenaga Kerja/Disnaker, Dinas Sosial/Dinsos, dan Dinas Pendidikan/Dispendik.

Namun, upaya penanggulangan kemiskinan tersebut terlihat masih belum efektif. Hal ini karena berbagai program kemiskinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya tidak saling terkoordinasi. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan tidak terfokus pada satu arah. Banyak program yang dilaksanakan berbagai SKPD tersebut saling tumpang tindih atau *overlapping* dan tidak saling menunjang. Ada dua penyebab utama tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan yaitu 1) tidak ada koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, dan 2) program penanggulangan kemiskinan tersebut masih belum merefleksikan kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan.

Diperlukan adanya program terpadu untuk penanggulangan kemiskinan di kota Surabaya. Program terpadu yang harus disediakan merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan memerlukan keterkaitan/koordinasi antar instansi, tanpa ada *overlapping* antar pelaksana program. Program terpadu yang harus disediakan tersebut adalah suatu program yang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin untuk memenuhi *basic need*, sehingga bisa hidup layak.

Kelompok miskin di Kota Surabaya termasuk kategori kemiskinan perkotaan. Beban orang miskin di perkotaan akan lebih berat daripada beban orang miskin di perdesaan. Orang miskin perkotaan harus menghadapi persaingan hidup yang sangat keras di tengah-tengah pembangunan perkotaan. Orang miskin perkotaan akan kalah bersaing dalam kesempatan lapangan pekerjaan. Orang miskin perkotaan juga harus menanggung biaya hidup yang sangat mahal di kota. Oleh karena itu, kelompok miskin di perkotaan akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) nya agar bisa hidup layak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program terpadu penanggulangan kemiskinan apa sajakah yang paling sesuai bagi kelompok miskin di Kota Surabaya berdasar prioritas kebutuhan/*basic need* mereka untuk hidup layak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan metode kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan bagaimana, kapan, dimana, dan suasana dari sesuatu yang diteliti (Berg 2000). Untuk mendapatkan data yang akurat dalam menjawab

pertanyaan penelitian ini, maka telah dilakukan penelitian pada sembilan kelurahan yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Surabaya dan sembilan instansi yang memiliki program kemiskinan. Kesembilan kelurahan tersebut adalah Kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambak Rejo, Sidodadi, Simolawang. Sedangkan instansi terkait adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (Bapemas KB), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Dispendukcapil), Dinas Cipta Karya, dan PDAM

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Stake 2010). Observasi dilakukan dengan cara melihat kondisi masyarakat di sejumlah sembilan kelurahan yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada para informan dari masyarakat maupun dari instansi terkait. Informan dari masyarakat adalah para tokoh masyarakat setempat. Sedangkan informan dari instansi terkait yaitu Bappeko (staf perencanaan dan penyusunan program), Bapemas KB (kasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat), Dinkes (kasi layanan khusus dan pelayanan kesehatan), Disnaker (kasi penempatan dan perluasan tenaga kerja), Dinsos (kasi penyandang masalah kesejahteraan sosial), Dispendik (staf bidang pendidikan layanan khusus), Dispendukcapil (staf bidang pencatatan sipil), Dinas Cipta Karya (staf seksi program dan perencanaan teknis), dan PDAM (staf penyusunan program).

Derajat kepercayaan pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong 2008). Selain melakukan wawancara dengan masyarakat dan aparat instansi terkait, untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan pula *cross check* terhadap dokumen resmi yang dimiliki instansi terkait serta pengamatan di lokasi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hill (dalam Lister 2004), kemiskinan diartikan seseorang dapat membeli apa yang mereka butuhkan namun tidak mampu membeli benda yang kebanyakan orang dapat membeli atau mereka tidak bisa makan dan hidup tanpa mendapatkan hutang. Kemudian Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan konsumsi bahwa orang dapat dikatakan miskin jika seseorang tersebut tidak dapat membeli makanan sesuai dengan standar gizi yang diperlukan oleh anak-anak (dalam Gordon dkk. 2003). UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa masalah kemiskinan bersifat multidimensi. Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar (*basic needs*) dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Selanjutnya Bappenas (dalam Jonaedi 2012) mendefinisikan kemiskinan secara lebih komprehensif, dengan melihat kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang dalam memenuhi kebutuhan minimum seperti pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan prioritas kelompok miskin yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan bahan pokok, (5) air bersih, (6) kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, (8) lapangan pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa kelompok miskin menempatkan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan sebagai tiga prioritas kebutuhan teratas.

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah kota Surabaya telah melaksanakan berbagai program terutama yang berhubungan dengan 3 prioritas kebutuhan kelompok miskin yaitu program pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bukunya, *Administration of Development Programs and Project, Some Major Issues*, mengemukakan bahwa "Program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas" (Tjokroamidjoyo 1990). Suatu program yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (1) tujuan yang jelas, (2) penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, (3) kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin, (4) pengukuran *cost benefit* yang akan dihasilkan program tersebut, (5) hubungan dengan kegiatan atau program lainnya (Tjokroamidjoyo 1990).

Dari penelitian ini, terlihat bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi tidak saling mendukung, bahkan terdapat tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini memperlihatkan bahwa program penanggulangan kemiskinan masih belum memiliki tujuan yang jelas. Terdapat empat program yang dalam pelaksanaannya *overlapping*, yaitu: 1) Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin oleh Bapemas *overlapping* dengan pelatihan *handycraft*, menjahit dan tata boga oleh Dinas Sosial. Kedua program tersebut pada intinya adalah sama yaitu memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat *handycraft* dan lain-lain yang sasarannya adalah perempuan keluarga miskin. 2) PMT atau Bantuan Makanan untuk Lansia yang dilakukan oleh Dinas Sosial *overlapping* dengan Program Pemberian *Snack* Lansia oleh Dinas Kesehatan. Pada dasarnya kedua program ini bertujuan sama yaitu perbaikan gizi pada Lansia. 3) Pendidikan Lanjutan Siswa Bermasalah Sosial oleh Disnaker *overlapping* dengan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pondok Sosial Anak Wonorejo oleh Dinsos. *Overlapping* dalam pelaksanaan program ini terjadi karena memang tidak ada koordinasi antara kedua instansi karena kedua instansi memiliki kriteria tersendiri dalam penentuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga sasaran dan target dari program ini tergantung masing-masing instansi. 4) Fasilitasi Pengembangan Kelompok Usaha Skala Mikro-kecil oleh Dinas Koperasi dan UMKM *overlapping* dengan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro oleh Bapemas. Kedua program ini memiliki kegiatan yang sama yaitu menyewakan stan untuk membantu pemasaran hasil usaha skala mikro.

Penyebab *overlapping* program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh instansi terkait karena tidak adanya koordinasi. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Surabaya, setidaknya terdapat tujuh instansi yang terlibat yaitu : (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, (2) Dinas Koperasi dan UMKM, (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (4) Dinas Kesehatan, (5) Dinas Tenaga Kerja, (6) Dinas Sosial, dan (7) Dinas Pendidikan. Dalam mengatasi kemiskinan, beberapa instansi memiliki keterkaitan dengan instansi lain untuk melaksanakan beberapa programnya. Namun

demikian, tidak semua instansi tersebut melakukan koordinasi meskipun programnya saling terkait. Pada tabel 2 menunjukkan keterkaitan instansi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Suarabaya berdasarkan prioritas kebutuhan kelompok miskin.

Tabel 2
Keterkaitan dan Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Antar Instansi

No	Instansi	Instansi Terkait	Koordinasi
1	Bapemasdan KB	Dinas Koperasi dan UMKM	Ya
		Disperindag	Ya
		Dinas Sosial	Tidak
		Dinas Tenaga Kerja	Tidak
		Dinas Pendidikan	Ya
2	Dinas Koperasi dan UMKM	Disperindag	Ya
		Dinas Kesehatan	Tidak
		Bapemasdan KB	Ya
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan UMKM	Ya
		Bapemasdan KB	Ya
4	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja	Tidak
		Bapemasdan KB	Tidak
		Dinas Kesehatan	Tidak
5	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Pendidikan	Tidak
		Bapemasdan KB	Tidak
		Dinas Sosial	Tidak
6	Dinas Pendidikan	Bapemasdan KB	Ya
		Dinas Tenaga Kerja	Tidak
7	Dinas Kesehatan	Dinas koperasi dan UMKM	Ya
		Dinas Sosial	Ya

Sumber : hasil olah data

Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun program penanggulangan yang dilaksanakan oleh suatu instansi selalu terkait dengan instansi yang lain, namun hampir sebagian besar tidak melakukan koordinasi. Hal inilah yang menyebabkan seringnya terjadi *overlapping* program penanggulangan kemiskinan dan berakibat program tersebut kurang efektif.

Untuk itulah diperlukan program terpadu antar instansi agar penanggulangan kemiskinan menjadi efektif. Untuk mendapatkan program terpadu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya koordinasi antar pelaksana. Banyak ahli mendefinisikan pemahaman tentang koordinasi dengan memberi pendapat yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni bahwa koordinasi adalah asas umum dalam semua organisasi atau dapat dikatakan koordinasi adalah asas pokok organisasi. Mooney (dalam Sutarto1998) mengemukakan bahwa pengertian koordinasi adalah “*The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of common purpose*”. Mooney memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan.

Pengaturan usaha kelompok atau organisasi memang diperlukan, mengingat organisasi terdiri atas sejumlah unit kerja yang berlainan fungsi namun diikat oleh satu kesatuan tujuan tertentu. Selaras dengan pendapat Mooney, Benn (dalam Sutarto1998) mengatakan bahwa “*Coordination: A Continuous, harmonious action toward the objectives, attained through*

leadership, organization, and administration; The arrangement of group efforts in a continuous and orderly manner so as to provide unification of action in the pursuit of a common goal". Dari pendapat tersebut diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa koordinasi adalah suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan, yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi. Koordinasi juga dipandang sebagai suatu penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama. Dari hasil penelitian telah disusun program terpadu penanggulangan kemiskinan yang mensyaratkan adanya keterkaitan dan koordinasi antar instansi. Program terpadu ini disusun berdasarkan prioritas kebutuhan kelompok miskin yang disinkronisasikan dengan berbagai program baik yang telah dilaksanakan maupun berupa usulan dari masing-masing instansi. Berikut adalah program-program yang telah teridentifikasi:

Tabel 3.
Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berdasar Kebutuhan Prioritas Kelompok Miskin

No	Prioritas Kebutuhan	Instansi Terkait	Program
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Bantuan Siswa Miskin (BSM) Beasiswa sekolah perkapalan Pembinaan SD, SMP dan SMA terbuka
		Dinas Sosial	Bantuan Pemberian Seragam dan Alat Tulis
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Jamkesmas Non Kuota) dan Jampersal
		Dinas Sosial Bapemasdan KB	Khitan Masal Anak dari Keluarga Tidak Mampu Penyediaan dan pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
3	Perumahan	Dinas Cipta Karya Dinas Sosial	Bedah Rumah / Rehabilitasi Rumah Fasilitasi dan pendampingan lingkungan rumah
4	Sembilan Bahan Pokok	Bapemasdan KB Dinas Sosial	Tim Koordinasi Program Beras Miskin Penyediaan bahan makan sehat bagi balita keluarga miskin (protein telur)
5	Air bersih	PDAM	Penyediaan air bersih
6	Kemudahan Administrasi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Fasilitas pengurusan akte kelahiran
7	Pelatihan Keahlian	Bapemasdan KB	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Keluarga Miskin
8	Lapangan kerja	Dinas Tenaga Kerja	Pendampingan dan pemilihan Bidang Kerja Bagi Calon Lulusan SMA / SMK / MA kelompok miskin

Sumber: Hasil olah data

Dari tabel 3 bisa dijelaskan bahwa program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya dilaksanakan oleh sejumlah delapan instansi terkait sebagai berikut :

- 1) Prioritas kebutuhan pendidikan; terdapat empat program dengan rincian program dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan satu program dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- 2) Prioritas kebutuhan kesehatan; terdapat tiga program yang masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapemas dan KB.
- 3) Prioritas kebutuhan perumahan; terdapat

dua program yang masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Dinas Sosial. 4) Prioritas kebutuhan sembilan bahan pokok; terdapat dua program yang masing-masing dilaksanakan oleh Bapemas dan KB dan Dinas Sosial. 5) Prioritas kebutuhan air bersih; terdapat satu program yang dilaksanakan oleh PDAM. 6) Prioritas kebutuhan kemudahan administrasi; terdapat satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 7) Prioritas kebutuhan pelatihan keahlian; terdapat satu program yang dilaksanakan oleh Bapemas dan KB. 8) Prioritas kebutuhan lapangan kerja; terdapat satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Simpulan

Penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya bisa efektif terlaksana bila menggunakan program terpadu. Tiap-tiap instansi di Kota Surabaya merancang program-program penanggulangan kemiskinan yang memiliki keterkaitan dan koordinasi dengan instansi lain. Program tersebut juga harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan kelompok miskin untuk bisa hidup layak di perkotaan. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pembuatan program terpadu penanggulangan kemiskinan yaitu: Melakukan *need assessment* terhadap *basic need*/kebutuhan prioritas kelompok miskin untuk dijadikan sebagai usulan program. Sinkronisasi/melakukan pemetaan masing-masing program dengan instansi terkait. Beberapa program yang *overlapping* harus dipangkas dan dilaksanakan oleh instansi yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pelaksana. Melakukan koordinasi antar instansi terkait mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Daftar Pustaka

- Jonaidi A (2012) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi. 1(1) April 2012: 140-164.
- Berg BL (2000) Qualitative research methods for the social sciences: Seventh Edition., Sydney: Allyn and Bacon.
- Gordon D, Nandy S, Pantazis C, Pemberton S dan Townsend P (2003) Child Poverty in the Developing World. UK : The Policy Press.
- Moleong LJ (2008) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Lister R (2004) Poverty. Cambridge: Polity Press.
- Stake R (2010) Qualitative Research. New York: The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc.
- Sutarto (1998) Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tjokroamidjojo B (1990) Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
- UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Re: Perbaikan artikel

From: Erna Setijaningrum (erna_set@yahoo.com)

To: mkpsurabaya@gmail.com

Date: Tuesday, 21 February 2017, 03:12 pm GMT+7

Berikut saya kirimkan pernyataan tidak plagiarism dan CV

Trm ksh atas perhatiannya

Erna

On Tuesday, 14 February 2017, 9:59, Masyarakat Kebudayaan Politik <mkpsurabaya@gmail.com> wrote:

Yth, Erna Setijaningrum

Berikut kami kirimkan form surat pernyataan bebas plagiarisme yang harus diisi dan dikirim kembali ke alamat email jurnal kami. serta mengirimkan CV tim peneliti untuk korespondensi

Terima kasih
Salam Redaksi

2017-02-12 9:36 GMT+07:00 Erna Setijaningrum <erna_set@yahoo.com>:


Kepada YTH :
Pengurus jurnal MKP

Salam
Berikut, saya kirimkan perbaikan artikel. Sudah saya perbaiki sesuai dengan saran reviewer agar memperbaiki metode penelitian sesuai yang dilaksanakan di lapangan.

Mohon juga diberi tambahan di judul (ditambahi footnote) : "Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi / PUPT, didanai DIKTI, 2014"

Terima kasih atas perhatiannya

Erna

 Pernyataan bebas Plagiarism (materai).pdf
57.1kB

 CV.doc
105kB

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini, saya yaitu :

Nama : Erna Setijaningrum
Instansi : FISIP Unair
Alamat : Kampus B Unair, Jln. Dharmawangsa Surabaya
Telepon : 082140029444
E-mail : erna_sct@yahoo.com

Menyatakan bahwa artikel yang saya masukkan untuk dilakukan review oleh Mitra Bebestari dan redaksi jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, yaitu:

Berjudul:

Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya

Adalah bebas dari plagiarisme¹, artinya bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, telah dilakukan **paraphrase** dengan baik dalam pengutipan, tak ada kalimat-kalimat/paragraf yang merupakan *copy and paste* ataupun "mengetik ulang dari tulisan orang lain", DAN saya/kami*telah menulis sumber/pemilik ide/sumber tulisan tersebut dengan kaidah penulisan ilmiah yang benar.

Bersama ini saya juga menyatakan bahwa artikel ini tidak akan dikirim ke jurnal lain, sampai ada keputusan dari jurnal MKP mengenai status pemuatan arti ke lini (diterima atau ditolak).

Demikian pernyataan saya/kami*, dan saya/kami* bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan **hukum yang berlaku**, apabila pernyataan diatas tidak benar. Saya/kami* juga bersedia untuk **membayar denda** pada jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik untuk mengganti ongkos cetak jurnal akibat adanya plagiarism didalam tulisan saya/ kami*.

Surabaya, 20 Pebruari 2017

rtanda.



(Erna Setijaningrum)

¹Mohon membacaterlebihdulampirandaripernyataanini, sebelummenandatangani pernyataanini

CURRICULUM VITAE

Nama : Dr.Erna Setijaniningrum, SIP,MSi
Tempat/tgl Lahir : Nganjuk, 3 Mei 1970
Pekerjaan : Staf Pengajar (Dosen) pada FISIP Unair
Alamat Kantor : Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya
Telp (Kantor) : 031-5034015
Telp (Hp) : 081578734342, 082140029444
Email : erna_set@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

No	Universitas	Jenjang	Bidang Ilmu	Tahun Lulus
1	Universitas Gadjah Mada (UGM)	S-1	Ilmu Administrasi Negara	1995
2	Universitas Gadjah Mada (UGM)	S-2	Ilmu Administrasi Negara	2006
3	Universitas Airlangga (Unair)	S-3	Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia	2015

Mata kuliah yang diampu saat ini :

No	Jenjang	Mata Kuliah
1	S-1 (Ilmu Administrasi Negara), FISIP Unair	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Publik2. Analisis Kebijakan Publik3. Study Implementasi4. Evaluasi Kebijakan Publik5. Kebijakan dan Kinerja Pelayanan Publik6. Perilaku Organisasi7. Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Sektor Publik
2	S2 (Magister Kebijakan Publik), FISIP Unair	<ol style="list-style-type: none">1. Teori Kebijakan Publik2. Analisis Kebijakan Publik3. Evaluasi Kebijakan Publik

Pengalaman Penelitian Lima Tahun Terakhir (2010-2016)

No	Judul	Kerjasama / Pendanaan	Tahun	Keterangan
1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk 2010-2030	Kerjasama Pemkab Nganjuk – LPPM Unair	2010	Ketua Peneliti
2	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam Rangka Mendukung Proses Pembangunan di Jawa Timur	Kerjasama Bappeda Jatim – LPPM Unair	2010	Ketua Peneliti
3	Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik	Hibah Soetandyo – FISIP Unair	2010	Ketua Peneliti
4	Penyusunan Optimalisasi Kinerja Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Jatim	Kerjasama Bappeda Jatim – LPPM Unair	2011	Ketua Peneliti
5	Penyusunan “Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengawasan Lingkungan /UKL-UPL” di RSUD Kertosono	Kerjasama Pemkab Nganjuk – LPPM Unair	2011	Ketua Peneliti
6	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Layanan Bidang Kesehatan di Puskesmas	Kerjasama Pemkab Nganjuk – LPPM Unair	2012	Ketua Peneliti
7	Penguatan Institusi Puskesmas Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Jawa Timur	Kerjasama Balitbang Jatim – LPPM Unair	2012	Anggota Peneliti
8	Strategi Peningkatan Fungsi Sosial Pada UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Kerjasama Bappeda Jatim – LPPM Unair	2012	Ketua Peneliti
9	Kajian Terhadap Revitalisasi Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Desa Dalam Rangka Percepatan MDG's di	Kerjasama Balitbang Jatim – LPPM Unair	2013	Anggota Peneliti

	Jawa Timur			
10	Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (tahun ke 1)	Unggulan Perguruan Tinggi Unair (DIKTI)	2013	Ketua Peneliti
11	Inovasi “ <i>Pro Poor Public Service</i> ” Bagi Masyarakat Miskin di Perkotaan (Tahun ke 1)	Unggulan Perguruan Tinggi Unair (DIKTI)	2013	Anggota Peneliti
12	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan (Implementasi e-Musrenbang di Kota Surabaya, Jawa Timur)	RKAT Departemen Ilmu Administrasi	2013	Anggota Peneliti
13	Kualitas Pelayanan Publik : Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Puskesmas di Kecamatan Krembangan Melalui Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat IKM) dan <i>Need Assessment</i> Masyarakat	RKAT Departemen Ilmu Administrasi	2013	Ketua Peneliti
14	Kajian Pengembangan Kapasitas Institusi Puskesmas Dalam Rangka Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Jawa Timur	Kerjasama Kerjasama Balitbang Jatim – LPPM Unair	2014	Ketua Peneliti
15	Studi Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk	Kerjasama Bappeda Kab Nganjuk – LPPM Unair	2014	Ketua Peneliti
16	Inovasi “ <i>Pro Poor Public Service</i> ” Bagi Masyarakat Miskin di Perkotaan (Tahun ke 2)	Unggulan Perguruan Tinggi Unair (DIKTI)	2014	Anggota Peneliti
17	Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (tahun ke 2)	Unggulan Perguruan Tinggi Unair (DIKTI)	2014	Ketua Peneliti
18	Kajian Strategi Model Inovasi Pelayanan Pada Puskesmas Rawat Inap di Jawa Timur	Kerjasama Kerjasama Balitbang Jatim – LPPM Unair	2015	Ketua Peneliti
19	Standarisasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Dalam Rangka Perencanaan Bidang Kesehatan	Kerjasama Kerjasama Bappeda Kab Madiun – LPPM Unair	2015	Ketua Peneliti
20	Kajian Layanan Maternal Dalam Mengurangi Resiko Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten	Kerjasama Kerjasama Bappeda Kab Nganjuk –	2015	Ketua Peneliti

	Nganjuk	LPPM Unair		
21	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Kerjasama Bappeda Kab Nganjuk – LPPM Unair	2015	Ketua Peneliti
22	Penguatan Kapasitas Institusi Puskesmas di Kabupaten Nganjuk	Kerjasama Bappeda Kab Nganjuk – LPPM Unair	2015	Ketua Peneliti
23	Pengembangan Program Telecenter Berbasis “ <i>Perception Expectation Gap dan Need Assessment</i> “ Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan	Unggulan Perguruan Tinggi Unair (DIKTI)	2015	Ketua Peneliti
24	Pengembangan Extra Role Behaviour sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Unggulan di Puskesmas Balongsari Surabaya	RKAT Departemen Administrasi, FISIP, Unair	2016	Ketua Peneliti
25	Model Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Rentan Miskin Di Provinsi Jawa Timur	Kerjasama Balitbang Jatim – LPI Unair	2016	Ketua Peneliti
26	Pegembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender	Kerjasama Bapemas Jatim – LPI Unair	2016	Anggota
27	Pengembangan Program Telecenter : Berbasis “ <i>Perception-Expectation Gap</i> ” dan “ <i>Need Assessment</i> ” Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Tahun ke 2)	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) - DIKTI	2016	Anggota

Pengalaman Profesi :

No	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Tahun
1	Instruktur dalam pelatihan “Peningkatan Pelayanan Publik Dengan Menggunakan Metode <i>Reinventing Government</i> Bagi Pegawai Kecamatan Nganjuk	LPPM Unair	2010
2	Instruktur dalam pelatihan “ Aplikasi Gaya Kepemimpinan Sosial dan Gaya Kepemimpinan Militer Bagi Taruna	LPPM Unair	2010

	Akademi Angkatan Laut		
3	Instruktur dalam pelatihan “ Manajemen Konflik” Bagi Taruna Angkatan Laut (AAL) dalam Menghadapi Kritik di Masyarakat	LPPM Unair	2011
4	Instruktur dalam pelatihan “ Penggunaan Metode <i>Citizen’s Charter</i> ” Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo	LPPM Unair	2011
5	Fasilitator dan pendampingan dalam ”Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu” Pada Kantor Perijinan Kediri.	LPPM Unair	2011
6	Fasilitator dan pendampingan dalam “Peringkasan Perijinan” Pada DPPM Kabupaten Sidoarjo	LPPM Unair	2011
7	Instruktur dalam pelatihan Penggunaan Metode TQM Dalam Birokrasi” Sebagai Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	LPPM Unair	2012
8	Instruktur dalam pelatihan “ Pelayanan Prima, Pelayanan Sepenuh Hati Pegawai Rumah Sakit Kabupaten Situbondo	LPPM Unair	2013
9	Instruktur dalam Pelatihan “ <i>Aplikasi Balanced Scorecard</i> ” Pada Organisasi Publik Sebagai Upaya Responsibilitas Pelayanan Publik	LPPM Unair	2013
10	Instruktur dalam Pelatihan “ <i>Good Corporate Governance</i> pada BUMN Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan BUMN dengan Status Public Service Obligation Pada PT POS Indonesia Kabupaten Sidoarjo	LPPM Unair	2013
11	Fasilitator dan pendampingan dalam “Pengembangan dan Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah”	LPPM Unair	2013

12	Instruktur dan fasilitator dalam Penyusunan Rencana Strategi Kabupaten Sampang	Kerjasama Bappeda Kabupaten Sampang – LPPM Unair	2013
13	Instruktur dalam Pelatihan “ <i>E-Procurement</i> ” : Transparansi Public Service	LPPM Unair	2014
14	Fasilitator dan pendampingan untuk penyusunan Kebijakan Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Pendidikan Nasional, Jakarta	LPPM Unair	2014
15	Instruktur dan fasilitator dalam penyusunan Kebijakan dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	LPPM Unair	2015
16	<i>Performance Based - Management</i>	LPPM Unair	2015
17	Narasumber dalam Musrenbang Kota Surabaya	Bappeko Kota Surabaya	2016

Pengalaman *Conference International* :

No	Nama Conference	Tahun	Keterangan
1	<i>Urban Mobility</i>	2012	Pembicara
2	<i>The International Conference in Malaysia – Indonesia Relations</i>	2013	Pembicara
3	<i>International Conference on Democracy and Accountability</i>	2014	Pembicara
4	<i>The International Conference in Malaysia – Indonesia Relations</i>	2015	Pembicara
5	10th International Conference on Malaysia –Indonesia (PAHMI)	2016	Pembicara
6	ICOCSA	2016	Pembicara

Judul Buku Teks dan Buku Ajar yang Diterbitkan :

No	Judul	Tahun	Penerbit
1	Sistem Ekonomi Indonesia : Era Global	2010	PT Revka Petra
2	Inovasi Pelayanan Publik	2010	PT Revka Petra
3	Isu-Isu Kontemporer Ilmu Administrasi Negara	2011	Graha Ilmu
4	Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik	2013	PT Revka Petra
5	Analisis Kebijakan Publik	2014	PT Revka Petra
6	Riset dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik	2015	PT. Revka Petra
7	Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik : Best Practice di Indonesia	2016	AUP Unair

Galley Proof Manuscript

From: Masyarakat Kebudayaan Politik (mkpsurabaya@gmail.com)

To: erna_set@yahoo.com

Date: Tuesday, 28 March 2017, 05:15 pm GMT+7

Yth kontributor Jurnal MKP 30-1

Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan anda dalam menjalani proses penerbitan di Jurnal MKP. Sebagai rangkaian proses terakhir, redaksi mengirimkan *Galley Proof* artikel anda agar kontributor mengecek kembali artikel yang akan diterbitkan.

Kontributor diperkenankan untuk meminta perubahan teknis (korespondensi penulis, daftar pustaka); namun tidak diperkenankan untuk membuat perubahan substantif.

Demi kelancaran penerbitan, kami mengharapkan artikel yang sudah dicek dapat dikembalikan ke email redaksi maksimal pada hari Rabu, 29 Maret 2017.

Terima kasih atas kerjasamanya.

Salam Redaksi



30-1 Setijaningrum.pdf
425.3kB

Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya

Integrated program design to overcome poverty in Surabaya

Erna Setijaningrum

Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. E-mail: erna_set@yahoo.com
Telepon: (031) 5034015

Abstract

Surabaya is one of metropolitan city in Surabaya, yet still has a high poverty rates. This research aims to design an integrated program in reducing poverty in Surabaya. The high poverty rates lead to several complex problems such as unemployment, education, health, crime and social problem. Actually, a lot of poverty alleviation programs have been implemented by the municipal government of Surabaya. However, the program is still less effective because: 1) there is lack of coordination among agencies in running the program and 2) the program does not reflect the needs of the poor to a decent life in urban areas. This research employs qualitative method carried out in several governmental bodies relating to the issue of poverty alleviation. The result of this study indicates that there are eight priority needs of the poor, namely (1) education, (2) health, (3) housing, (4) nine basic needs, (5) clean water, (6) ease of administration, (7) training expertise, and (8) employment. From the eight priority needs of the poor, we found design of integrated program of poverty reduction which requires good coordination among relevant agencies. There are eight institutions which government agency should coordinate in the integrated program, namely (1) the Department of Education, (2) Social Service, (3) Departement of Health, (4) the Ministry of Community Empowerment, (5) Department of housing, planning, and urban development (6) Water Supply Company, (7) Department of Civil and Population, (8) the Ministry of Labour.

Keywords: *integrated programme, poverty reduction, coordination, the priority needs of the poor*

Abstrak

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Permasalahan kemiskinan ini menimbulkan masalah kompleks seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, dan masalah sosial. Sebenarnya sudah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. Namun program tersebut masih kurang efektif karena: 1) tidak ada koordinasi antar instansi dalam menjalankan program dan 2) program tersebut tidak merefleksikan kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan dilaksanakan pada instansi-instansi yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Bapemas dan KB, Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dispendik dan PDAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan prioritas kebutuhan kelompok miskin yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan kebutuhan pokok, (5) air bersih, (6) kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, dan (8) lapangan kerja. Dari kedelapan kebutuhan prioritas kelompok miskin tersebut ditemukan desain program terpadu penanggulangan kemiskinan yang mensyaratkan adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait. Instansi yang harus melakukan koordinasi dalam program terpadu tersebut sejumlah delapan instansi yaitu (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Sosial, (3) Dinas Kesehatan, (4) Bapemas dan KB, (5) Dinas Cipta Karya, (6) PDAM, (7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (8) Dinas Tenaga Kerja.

Kata kunci: program terpadu, penanggulangan kemiskinan, koordinasi, kebutuhan prioritas kelompok miskin

Pendahuluan

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin di kota

Setijaningrum: “Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya”

Surabaya pada tahun 2009 sebanyak 171.200 jiwa, tahun 2010 sebanyak 195.700 jiwa, tahun 2011 sebanyak 183.300 jiwa, tahun 2012 sebanyak 175.100 jiwa, dan tahun 2013 sebanyak 168.690 jiwa. Apabila dilihat dari prosentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di Kota Surabaya, maka prosentase penduduk miskin di kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 6.72%, tahun 2010 sebesar 7.07%, tahun 2011 sebesar 6.58%, tahun 2012 sebesar 6.23%, tahun 2013 sebesar 5.97%. Kemiskinan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks di masyarakat. Banyaknya orang miskin yang menganggur atau hanya memiliki penghasilan yang kurang, akan menyebabkan orang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarganya. Akibatnya, keluarga miskin menjadi kurang sehat atau sakit-sakitan karena kekurangan gizi dan nutrisi. Keluarga miskin juga akan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena anak-anak mereka ikut mencari nafkah membantu beban keluarga. Akibat selanjutnya, banyak anak-anak dari keluarga miskin yang turun atau bahkan hidup di jalanan. Kemiskinan juga mengakibatkan kriminalitas yang terjadi sebagai akibat tidak tercukupinya kebutuhan hidup orang miskin yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu yang seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan. Akibat lebih jauh lagi dari masalah kemiskinan adalah masalah sosial, seperti tidak diterimanya kelompok miskin ini di masyarakat karena dianggap “mengganggu”.

Kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Semampir, Kecamatan Tambaksari, dan Kecamatan Simokerto. Kecamatan Semampir terdiri dari 5 kelurahan dengan 60.41% keluarga miskin, Tambaksari terdiri dari 6 kelurahan dengan 12.47% keluarga miskin, sedangkan kecamatan Simokerto terdiri dari 5 kelurahan dengan 41.82% keluarga miskin. Berikut, data prosentase keluarga miskin di Kecamatan Semampir, Tambaksari, dan Simokerto.

Tabel 1.
Prosentase keluarga miskin di Kecamatan Semampir, Tambaksari, Simokerto

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Keluarga Seluruhnya	Jumlah Keluarga Miskin	Prosentase (%)
1	Semampir	Ampel	5.333	906	6,33
		Sidotopo	8.271	4.937	13,21
		Pegirian	6.610	3.561	10,17
		Wonokusumo	12.244	5.887	18,13
		Ujung	7.485	5.176	12,60
Jumlah			39.943	20.467	60,41
2	Tambaksari	Pacarkeling	7.559	1.537	20,33
		Pacar	9.469	1.701	17,96
		Kembang			
		Ploso	6.376	2.016	31,62
		Tambaksari	3.940	1.142	28,98
		Rangkah	3.863	1.080	27,96
3	Simokerto	Gading	24.357	3.037	12,47
		Kapasan	16.980	692	4,07
		Tambak Rejo	17.668	1.552	8,78
		Simokerto	23.822	1.752	7,35
		Sidodadi	16.080	1.682	10,46
Jumlah			96.658	8.146	41,82

Sumber : BPS Jatim 2012

Dari tabel 1 terlihat bahwa 3 kelurahan dari masing-masing kecamatan yang memiliki angka kemiskinan tinggi adalah: 1) Kecamatan Semampir (Kelurahan Sidotopo, Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Ujung), 2) Kecamatan Tambaksari (Kelurahan Ploso, Kelurahan Tambaksari, Kelurahan Rangkah), dan 3) Kecamatan Simokerto (Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Simolawang).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya. Instansi terkait yang telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana/Bapemas KB, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Disperindag, Dinas Kesehatan/Dinkes, Dinas Tenaga Kerja/Disnaker, Dinas Sosial/Dinsos, dan Dinas Pendidikan/Dispendik.

Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut terlihat masih belum efektif. Hal ini karena berbagai program kemiskinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya tidak saling terkoordinasi. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan tidak terfokus pada satu arah. Banyak program yang dilaksanakan berbagai SKPD tersebut saling tumpang tindih atau *overlapping* dan tidak saling menunjang. Ada dua penyebab utama tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan, yaitu 1) tidak ada koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, dan 2) program penanggulangan kemiskinan tersebut masih belum merefleksikan kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan.

Diperlukan adanya program terpadu untuk penanggulangan kemiskinan di kota Surabaya. Program terpadu yang harus disediakan merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan memerlukan keterkaitan/koordinasi antar instansi, tanpa ada *overlapping* antar pelaksana program. Program terpadu yang harus disediakan tersebut adalah suatu program yang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin untuk memenuhi *basic need*, sehingga bisa hidup layak.

Kelompok miskin di Kota Surabaya termasuk kategori kemiskinan perkotaan. Beban orang miskin di perkotaan akan lebih berat daripada beban orang miskin di pedesaan. Orang miskin perkotaan harus menghadapi persaingan hidup yang sangat keras di tengah-tengah pembangunan perkotaan. Orang miskin perkotaan akan kalah bersaing dalam kesempatan lapangan pekerjaan. Orang miskin perkotaan juga harus menanggung biaya hidup yang sangat mahal di kota. Oleh karena itu, kelompok miskin di perkotaan akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) nya agar bisa hidup layak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program terpadu penanggulangan kemiskinan apa sajakah yang paling sesuai bagi kelompok miskin di Kota Surabaya berdasar prioritas kebutuhan/*basic need* mereka untuk hidup layak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan metode kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan bagaimana, kapan, di mana, dan suasana dari sesuatu yang diteliti (Berg 2000). Untuk mendapatkan data yang akurat dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, maka telah dilakukan penelitian pada sembilan kelurahan yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Surabaya dan sembilan instansi yang memiliki program kemiskinan. Kesembilan kelurahan tersebut adalah Kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambak Rejo, Sidodadi, Simolawang. Sedangkan instansi terkait adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (Bapemas KB), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Dispendukcapil), Dinas Cipta Karya, dan PDAM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Stake 2010). Observasi dilakukan dengan cara melihat kondisi masyarakat di sejumlah sembilan kelurahan yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada para informan dari masyarakat maupun dari instansi terkait. Informan dari masyarakat adalah para tokoh masyarakat setempat, sedangkan informan dari instansi terkait, yaitu Bappeko (staf perencanaan dan penyusunan program), Bapemas KB (kasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat), Dinkes (kasi layanan khusus dan pelayanan kesehatan), Disnaker (kasi penempatan dan perluasan tenaga kerja), Dinsos (kasi penyandang masalah kesejahteraan sosial),

Setijaningrum: “Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya”

Dispendik (staf bidang pendidikan layanan khusus), Dispendukcapil (staf bidang pencatatan sipil), Dinas Cipta Karya (staf seksi program dan perencanaan teknis), dan PDAM (staf penyusunan program).

Derajat kepercayaan pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong 2008). Selain melakukan wawancara dengan masyarakat dan aparat instansi terkait, untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan pula *cross check* terhadap dokumen resmi yang dimiliki instansi terkait serta pengamatan di lokasi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hill (dalam Lister 2004), kemiskinan diartikan seseorang dapat membeli apa yang mereka butuhkan namun tidak mampu membeli benda yang kebanyakan orang dapat membeli atau mereka tidak bisa makan dan hidup tanpa mendapatkan hutang. Kemudian Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan konsumsi bahwa orang dapat dikatakan miskin jika seseorang tersebut tidak dapat membeli makanan sesuai dengan standar gizi yang diperlukan oleh anak-anak (dalam Gordon dkk. 2003). UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa masalah kemiskinan bersifat multidimensi. Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar (*basic needs*) dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Selanjutnya Bappenas (dalam Jonaedi 2012) mendefinisikan kemiskinan secara lebih komprehensif, dengan melihat kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang dalam memenuhi kebutuhan minimum seperti pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan prioritas kelompok miskin yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan bahan pokok, (5) air bersih, (6) kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, (8) lapangan pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa kelompok miskin menempatkan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan sebagai tiga prioritas kebutuhan teratas.

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah kota Surabaya telah melaksanakan berbagai program terutama yang berhubungan dengan 3 prioritas kebutuhan kelompok miskin yaitu program pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bukunya, *Administration of Development Programs and Project, Some Major Issues*, mengemukakan bahwa “Program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas” (Tjokroamidjoyo 1990). Suatu program yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (1) tujuan yang jelas, (2) penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, (3) kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin, (4) pengukuran *cost benefit* yang akan dihasilkan program tersebut, (5) hubungan dengan kegiatan atau program lainnya (Tjokroamidjoyo 1990).

Dari penelitian ini, terlihat bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi tidak saling mendukung, bahkan terdapat tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini memperlihatkan bahwa program penanggulangan kemiskinan masih belum memiliki tujuan yang

kelas. Terdapat empat program yang dalam pelaksanaannya *overlapping*, yaitu: 1) Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin oleh Bapemas *overlapping* dengan pelatihan *handycraft*, menjahit dan tata boga oleh Dinas Sosial. Kedua program tersebut pada intinya adalah sama yaitu memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat *handycraft* dan lain-lain yang sarasannya adalah perempuan keluarga miskin. 2) PMT atau Bantuan Makanan untuk Lansia yang dilakukan oleh Dinas Sosial *overlapping* dengan Program Pemberian *Snack* Lansia oleh Dinas Kesehatan. Pada dasarnya kedua program ini bertujuan sama yaitu perbaikan gizi pada Lansia. 3) Pendidikan Lanjutan Siswa Bermasalah Sosial oleh Disnaker *overlapping* dengan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pondok Sosial Anak Wonorejo oleh Dinsos. *Overlapping* dalam pelaksanaan program ini terjadi karena memang tidak ada koordinasi antara kedua instansi karena kedua instansi memiliki kriteria tersendiri dalam penentuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sehingga sasaran dan target dari program ini tergantung masing-masing instansi. 4) Fasilitasi Pengembangan Kelompok Usaha Skala Mikro-kecil oleh Dinas Koperasi dan UMKM *overlapping* dengan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro oleh Bapemas. Kedua program ini memiliki kegiatan yang sama yaitu menyewakan stan untuk membantu pemasaran hasil usaha skala mikro.

Penyebab *overlapping* program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh instansi terkait karena tidak adanya koordinasi. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Surabaya, setidaknya terdapat tujuh instansi yang terlibat yaitu: (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, (2) Dinas Koperasi dan UMKM, (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (4) Dinas Kesehatan, (5) Dinas Tenaga Kerja, (6) Dinas Sosial, dan (7) Dinas Pendidikan. Dalam mengatasi kemiskinan, beberapa instansi memiliki keterkaitan dengan instansi lain untuk melaksanakan beberapa programnya. Namun demikian, tidak semua instansi tersebut melakukan koordinasi meskipun programnya saling terkait. Pada tabel 2 menunjukkan keterkaitan instansi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Surabaya berdasarkan prioritas kebutuhan kelompok miskin.

Tabel 2.
Keterkaitan dan Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Antar Instansi

No	Instansi	Instansi Terkait	Koordinasi
1	Bapemas dan KB	Dinas Koperasi dan UMKM	Ya
		Disperindag	Ya
		Dinas Sosial	Tidak
		Dinas Tenaga Kerja	Tidak
		Dinas Pendidikan	Ya
2	Dinas Koperasi dan UMKM	Disperindag	Ya
		Dinas Kesehatan	Tidak
		Bapemas dan KB	Ya
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan UMKM	Ya
		Bapemas dan KB	Ya
4	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja	Tidak
		Bapemas dan KB	Tidak
		Dinas Kesehatan	Tidak
5	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Pendidikan	Tidak
		Bapemas dan KB	Tidak
		Dinas Sosial	Tidak
6	Dinas Pendidikan	Bapemas dan KB	Ya
		Dinas Tenaga Kerja	Tidak
7	Dinas Kesehatan	Dinas koperasi dan UMKM	Ya
		Dinas Sosial	Ya

Sumber : hasil olah data

Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun program penanggulangan yang dilaksanakan oleh suatu instansi selalu terkait dengan instansi yang lain, namun hampir sebagian besar tidak melakukan koordinasi. Hal ini yang menyebabkan seringkali terjadi *overlapping* program penanggulangan kemiskinan dan berakibat program tersebut kurang efektif.

Setijaningrum: “Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya”

Untuk itulah diperlukan program terpadu antar instansi agar penanggulangan kemiskinan menjadi efektif. Untuk mendapatkan program terpadu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya koordinasi antar pelaksana. Banyak ahli mendefinisikan pemahaman tentang koordinasi dengan memberi pendapat yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni bahwa koordinasi adalah asas umum dalam semua organisasi atau dapat dikatakan koordinasi adalah asas pokok organisasi. Mooney (dalam Sutarto 1998) mengemukakan bahwa pengertian koordinasi adalah “*The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of common purpose*”. Mooney memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan.

Pengaturan usaha kelompok atau organisasi memang diperlukan, mengingat organisasi terdiri atas sejumlah unit kerja yang berlainan fungsi namun diikat oleh satu kesatuan tujuan tertentu. Selaras dengan pendapat Mooney, Benn (dalam Sutarto 1998) mengatakan bahwa “*Coordination: A Continuous, harmonious action toward the objectives, attained through leadership, organization, and administration; The arrangement of group efforts in a continuous and orderly manner so as to provide unification of action in the pursuit of a common goal*”. Dari pendapat tersebut diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa koordinasi adalah suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan, yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi. Koordinasi juga dipandang sebagai suatu penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

Dari hasil penelitian telah disusun program terpadu penanggulangan kemiskinan yang mensyaratkan adanya keterkaitan dan koordinasi antar instansi. Program terpadu ini disusun berdasarkan prioritas kebutuhan kelompok miskin yang disinkronisasikan dengan berbagai program baik yang telah dilaksanakan maupun berupa usulan dari masing-masing instansi. Tabel 3 adalah program-program yang telah teridentifikasi.

Tabel 3.
Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berdasar Kebutuhan Prioritas Kelompok Miskin

No	Prioritas Kebutuhan	Instansi Terkait	Program
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dinas Sosial	Bantuan Siswa Miskin (BSM) Beasiswa sekolah perkapalan Pembinaan SD, SMP dan SMA terbuka Bantuan Pemberian Seragam dan Alat Tulis
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan Dinas Sosial Bapemas dan KB	Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Jamkesmas Non Kuota) dan Jampersal Khitan Masal Anak dari Keluarga Tidak Mampu Penyediaan dan pelayanan alat kontrasepsi bagi Gakin
3	Perumahan	Dinas Cipta Karya Dinas Sosial	Bedah Rumah / Rehabilitasi Rumah Fasilitasi dan pendampingan lingkungan rumah
4	Sembilan Bahan Pokok	Bapemas dan KB Dinas Sosial	Tim Koordinasi Program Beras Miskin Penyediaan bahan makan sehat bagi balita keluarga miskin (protein telur)
5	Air bersih	PDAM	Penyediaan air bersih
6	Kemudahan Administrasi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Fasilitas pengurusan akte kelahiran
7	Pelatihan Keahlian	Bapemas dan KB	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Keluarga Miskin
8	Lapangan kerja	Dinas Tenaga Kerja	Pendampingan dan Pemilihan Bidang Kerja Bagi Calon Lulusan SMA / SMK / MA kelompok miskin

Sumber: Hasil olah data

Dari tabel 3 bisa dijelaskan bahwa program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya dilaksanakan oleh sejumlah delapan instansi terkait sebagai berikut:

1) Prioritas kebutuhan pendidikan; terdapat empat program dengan rincian program dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan satu program dilaksanakan oleh Dinas Sosial. 2) Prioritas kebutuhan kesehatan; terdapat tiga program yang masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapemas dan KB. 3) Prioritas kebutuhan perumahan; terdapat dua program yang masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Dinas Sosial. 4) Prioritas kebutuhan sembilan bahan pokok; terdapat dua program yang masing-masing dilaksanakan oleh Bapemas dan KB dan Dinas Sosial. 5) Prioritas kebutuhan air bersih; terdapat satu program yang dilaksanakan oleh PDAM. 6) Prioritas kebutuhan kemudahan administrasi; terdapat satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 7) Prioritas kebutuhan pelatihan keahlian; terdapat satu program yang dilaksanakan oleh Bapemas dan KB. 8) Prioritas kebutuhan lapangan kerja; terdapat satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Simpulan

Penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya bisa efektif terlaksana bila menggunakan program terpadu. Tiap-tiap instansi di Kota Surabaya merancang program-program penanggulangan kemiskinan yang memiliki keterkaitan dan koordinasi dengan instansi lain. Program tersebut juga harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan kelompok miskin untuk bisa hidup layak di perkotaan. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pembuatan program terpadu penanggulangan kemiskinan yaitu: Melakukan *need assessment* terhadap *basic need*/kebutuhan prioritas kelompok miskin untuk dijadikan sebagai usulan program. Sinkronisasi/melakukan pemetaan masing-masing program dengan instansi terkait. Beberapa program yang *overlapping* harus dipangkas dan dilaksanakan oleh instansi yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pelaksana. Melakukan koordinasi antar instansi terkait mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Daftar Pustaka

- Jonaidi A (2012) Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi* 1 (1):140-164.
- Berg BL (2000) *Qualitative Research Methods for The Social Sciences: Seventh Edition*. Sydney: Allyn and Bacon.
- Gordon D, Nandy S, Pantazis C, Pemberton S dan Townsend P (2003) *Child Poverty in the Developing World*. UK: The Policy Press.
- Moleong LJ (2008) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Lister R (2004) *Poverty*. Cambridge: Polity Press.
- Stake R (2010) *Qualitative Research*. New York: The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc.
- Sutarto (1998) *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tjokroamidjojo B (1990) *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Pemberitahuan untuk Kontribusi Jurnal

From: Masyarakat Kebudayaan Politik (mkpsurabaya@gmail.com)

To: arif_junaidi2003@yahoo.com; erna_set@yahoo.com; ali.sahab@fisip.unair.ac.id; pawitmy@gmail.com; dtetuko@gmai.com; ib_susilo@yahoo.com; karnaji@fisip.unair.ac.id; vkapti89@gmail.com; aldryan95@gmail.com

Date: Tuesday, 4 April 2017, 08:40 am GMT+7

Kepada Yth.

Para kontributor tulisan di jurnal MKP 30.1

Saat ini jurnal yang memuat tulisan anda telah terpublikasi secara online.

Untuk membantu keberlangsungan jurnal, maka penulis diwajibkan untuk memberi kontribusi minimal sebesar Rp.500.000,00

Kontribusi dapat dikirimkan ke rekening Bank Mandiri KK Surabaya Unair nomor 142-00-1508647-2, atas nama Siti Mas'udah.

Kontribusi ini tidak termasuk pembelian versi cetak jurnal. Jika ingin membeli jurnal dapat mengisi form Pre-Order jurnal. Harga per-eksemplar jurnal senilai Rp.65.000

Mohon mengirim ke alamat e-mail ini

1. Bukti transfer
2. Alamat pengiriman jurnal (Jika membeli versi cetak jurnal)

Artikel dapat diakses di link <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/MKP>

Demikian pemberitahuan kami, dan kami ucapkan terima kasih atas kerja samanya.

Terima kasih

Salam Redaksi



Pre Order Jurnal MKP.docx
14.7kB

Formulir Pemesanan

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Jalan Dharmawangsa Dalam (Timur Perpustakaan Kampus B)

Universitas Airlangga Surabaya 60286

Telephone: (031) 5017429, Fax: (031) 5992248, E-mail:mkpsurabaya@gmail.com

Website:<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/MKP/issue/archive>

Nama :

Institusi :

Alamat Pengiriman :

Volume	Edisi	Jumlah Eksemplar

Pembayaran melalui transfer ke:

No Rekening. 142-00-1508647-2

Bank : Mandiri KK UNAIR Surabaya

Nama : Siti Mas'udah

Setelah melakukan transfer harap mengirim bukti transfer ke email redaksi MKP untuk proses percetakan jurnal. Lama percetakan jurnal kurang lebih dua minggu, selebihnya akan kami informasikan lebih lanjut.

Shift+K Pemberitahuan untuk Kontribusi Jurnal

From: Erna Setijaningrum (erna_set@yahoo.com)

To: mkpsurabaya@gmail.com

Date: Tuesday, 18 April 2017, 09:52 am GMT+7

Kepada :
Redaksi Jurnal MKP

Terima kasih atas dimuatnya artikel saya di jurnal.

Berikut, sy attach :

1. Pre order cetak jurnal
2. Bukti transfer cetak jurnal sebesar Rp. 260.000,00 (untuk cetak 4 eksemplar jurnal)
3. Bukti transfer uang kontribusi sebesar Rp. 1.000.000,00

Salam
Erna

On Deep Purple, Masyarakat Kebudayaan Politik <mkpsurabaya@gmail.com> wrote:

Kepada Yth.

Para kontributor tulisan di jurnal MKP 30.1

Saat ini jurnal yang memuat tulisan anda telah terpublikasi secara online.

Untuk membantu keberlangsungan jurnal, maka penulis diwajibkan untuk memberi kontribusi minimal sebesar Rp.500.000,00

Kontribusi dapat dikirimkan ke rekening Bank Mandiri KK Surabaya Unair nomor 142-00-1508647-2, atas nama Siti Mas'udah.

Kontribusi ini tidak termasuk pembelian versi cetak jurnal. Jika ingin membeli jurnal dapat mengisi form Pre-Order jurnal. Harga per-eksemplar jurnal senilai Rp.65.000

Mohon mengirim ke alamat e-mail ini

1. Bukti transfer
2. Alamat pengiriman jurnal (Jika membeli versi cetak jurnal)

Artikel dapat diakses di link <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/MKP>

Demikian pemberitahuan kami, dan kami ucapkan terima kasih atas kerja samanya.

Terima kasih
Salam Redaksi



Pre Order Jurnal MKP.docx
15kB



Cetak jurnal.jpeg
36.1kB



Kontribusi.jpeg
39.7kB

Formulir Pemesanan

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Jalan Dharmawangsa Dalam (Timur Perpustakaan Kampus B)

Universitas Airlangga Surabaya 60286

Telephone: (031) 5017429, Fax: (031) 5992248, E-mail:mkpsurabaya@gmail.com

Website:<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/MKP/issue/archive>

Nama : Erna Setijaningrum

Institusi : Fisip Unair

Alamat Pengiriman : Departertemen Administrasi, FISIP Unair, Kampus B Unair

Volume	Edisi	Jumlah Eksemplar
30	No 1 (2017)	4 eksemplar

Pembayaran melalui transfer ke:

No Rekening. 142-00-1508647-2

Bank : Mandiri KK UNAIR Surabaya

Nama : Siti Mas'udah

Setelah melakukan transfer harap mengirim bukti transfer ke email redaksi MKP untuk proses percetakan jurnal. Lama percetakan jurnal kurang lebih dua minggu, selebihnya akan kami informasikan lebih lanjut.

-*** BANK MANDIRI ***-

TANGGAL	WAKTU	TERMINAL
04/17/17	19:31	S1AWKDKR

LOKASI SBY SPBU NGAGEL JAYA

RECORD NO. 4441

TRANSFER RP. 260,000.00

DARI TABUNGAN

REK. NO. : 14100098XXXXX

KE : SITI MAS'UDAH

REK. NO. : 1420015086472

CASHBACK 20L BBM & SALDO E-MONEY

RP100RB DGN MANDIRI KK PERTAMINA

SD 30 JUNI 2017 S&K

*** BANK MANDIRI ***

TANGGAL WAKTU TERMINAL
04/17/17 19:31 S1AWKDKR

LOKASI SBY SPBU NGAGEL JAYA

RECORD NO. 4439

TRANSFER RP. 1,000,000.00

DARI TABUNGAN

REK. NO. : 14100098XXXXX

KE : SITI MAS'UDAH

REK. NO. : 1420015086472

CASHBACK 20L BBM & SALDO E-MONEY

RP100RB DGN MANDIRI KK PERTAMINA

SD 30 JUNI 2017 S&K

INFO:MANDIRI CALL 14000